

LAPORAN KINERJA [LKJ] TAHUN 2023



bkkbn

BERENCANA ITU KEREN



**KEKERASAN
TERHADAP
PEREMPUAN
DAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Ranai, 20 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, SP., M.Si
NIP. 197106042002122002

DAFTAR ISI



01

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel



02

Bab I
Pendahuluan
1.1 Landasan Hukum
1.2 Struktur dan Organisasi
1.3 Fungsi dan Tugas
1.4 Isu Strategis
1.5 Keadaan Pegawai
1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana
1.7 Keuangan
1.8 Sistematika LKIP



03

Bab II
Perencanaan Kinerja
2.1 Perjanjian Kinerja
2.2 Program, Sasaran Strategis dan Indikator Target



04

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-Akhir

Periode RPJMD/RENSTRA

3.5 Realisasi Anggaran

3.6 Alokasi Sasaran Pembangunan Berdasarkan Cost Per Outcome

3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Cost Per Outcome

BAB I

PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

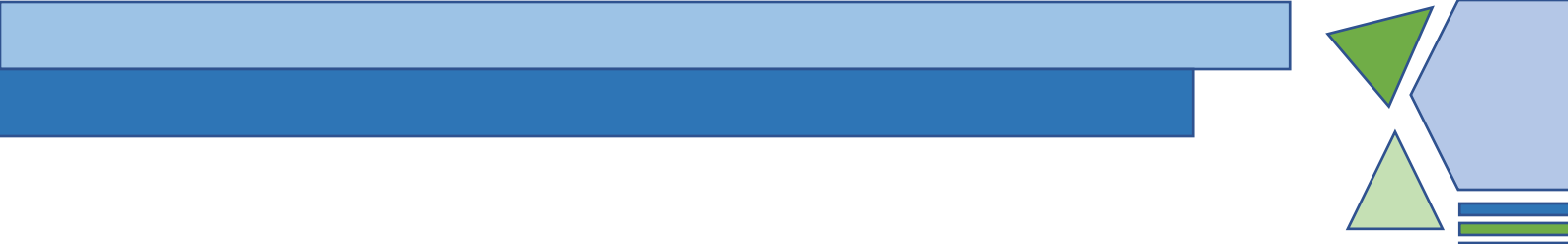
- *Landasan Hukum*
- *Struktur Organisasi*
- *Fungsi dan Tugas*
- *Isu Strategis*
- *Keadaan Pegawai*
- *Keadaan Saranadan Prasarana*
- *Keuangan*
- *Sistematika LKIP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KB Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Intansi tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

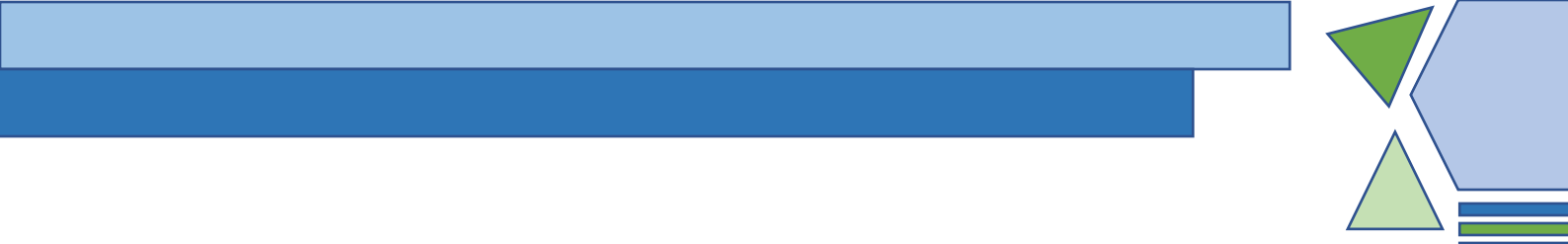
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DP3AP2KB Tahun 2023 diharapkan dapat:

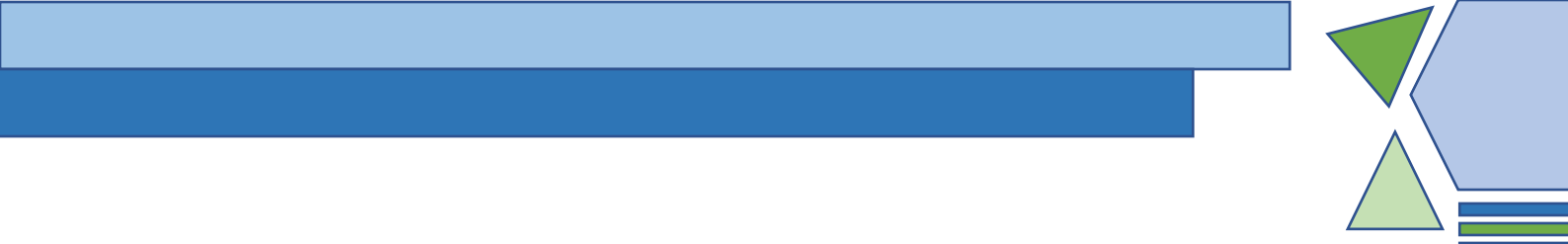
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh DP3AP2KB
2. Mendorong DP3AP2KB untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DP3AP2KB untuk meningkatkan kinerjanya

- 
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap DP3AP2KB di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

- 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 39)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46)
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 227) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 290)

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302)

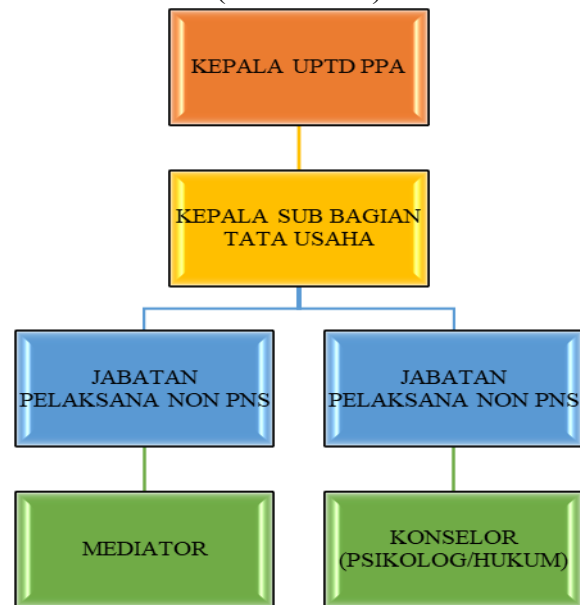
1.2 Struktur Organisasi

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, maka tupoksi tersebut dijabarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut:

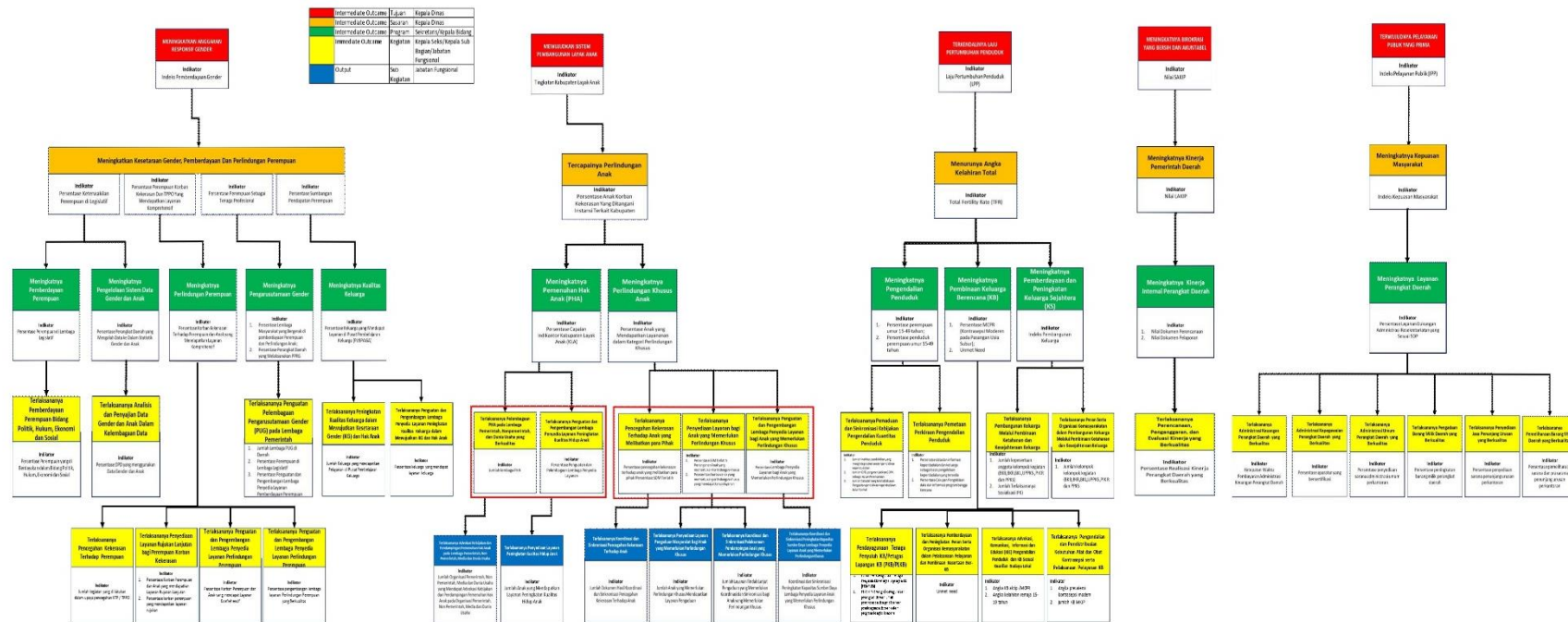
Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Gambar 1.2 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA)



Gambar 1.3 Pohon Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna

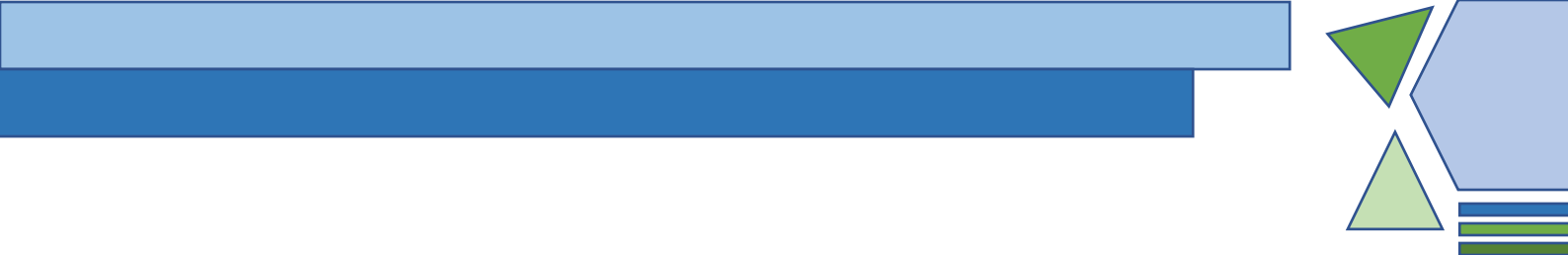


1.3 Fungsi dan Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat (terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

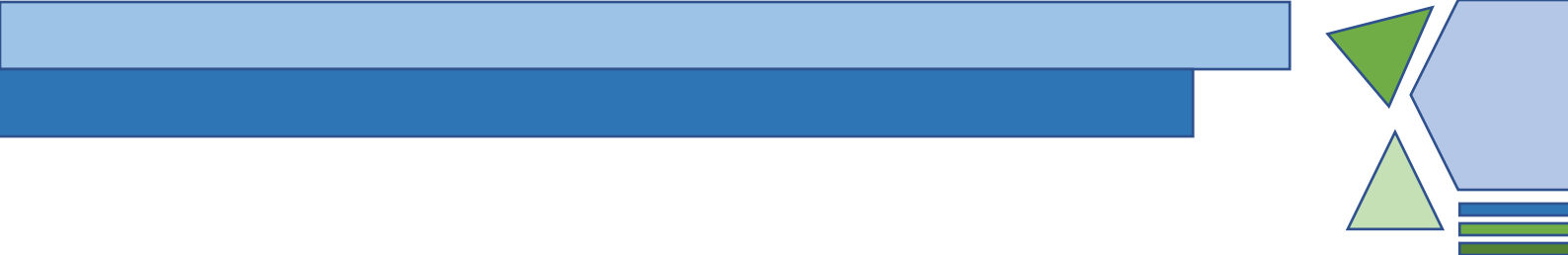
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana

- 
- f. Menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan Dinas
 - g. Merumuskan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - i. Menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - j. Mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan dinas
 - k. Mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan lingkup tugasnya

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuannya dan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama dengan bidang – bidang teknis, berkaitan dengan peran Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan



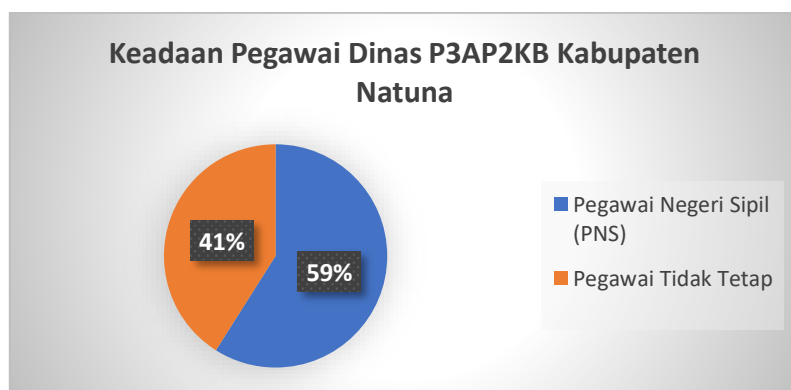
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, isu-isu yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- b. Tingginya Pernikahan Usia Anak
- c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Belum Optimal Peran Satgas Desa Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- e. Masih Kurangnya Sinergisitas Program /Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Banyak Kasus tak Terlayani Secara Komprehensif Karena Letak Geografis Sehingga Membutuhkan Waktu dan Anggaran Untuk Mendatangkan Psikolog ke Pulau–Pulau
- g. Masih Kurangnya SDM Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak
- h. Masih tingginya Angka Kelahiran Total Per wanita Usia Subur (15-49 tahun)
- i. Masih rendahnya penggunaan kontrasepsi modern pada peserta KB baru
- j. Masih rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan keluarga
- k. Tingginya Unmet need
- l. Belum optimalnya kualitas dan ketahanan keluarga
- m. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan

1.5 Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia Dinas P3AP2KB terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 2 kepala bidang, Kelompok Jabatan Fungsional 6, dan 1 Kepala UPTD

PPA. Personil keseluruhan berjumlah 39 orang, terdiri dari PNS 23 orang (58,97%), Pegawai Tidak Tetap (PTT) 16 orang (41,02%).



Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 8 orang (20,51%), dan perempuan 31 orang (79,48%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari: golongan II/d 2 Orang (8,69%), golongan II/c 1 orang (4,34%), golongan III/d 2 orang (8,69%), golongan III/c 5 orang (21,73%), golongan III/b 5 orang (21,73%), golongan III/a 3 orang (13,04%), golongan IV/b 2 orang (8,69%), golongan IV/a 3 Orang (13,04%).

Berikut ini daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin:

Tabel 1.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorar
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P
II/d	-	2	-	-	-	-	-	2
II/c	-	1	-	-	-	-	-	1
III/d	-	2	-	-	-	-	-	2

III/c	-	1	-	3	-	1	-	5
III/b	-	-	-	3	-	2	-	5
III/a	-	2	-	-	-	1	-	3
IV/b	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/a	-	1	-	1	-	1	-	3
Honorar	2	3	1	5	2	3	5	12
JUMLAH	2	12	1	12	2	9	5	33
TOTAL	14		13		11		38	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari 2023)

Tabel I.2

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTA/MA	-	3	-	-	-	-	-	3	3
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	1	-	-	-	1	-	2	2
S1	1	3	-	6	-	3	1	12	13
S2	-	1	-	1	-	2	1	3	4
JUMLAH	1	8	-	7	-	6	1	21	22
TOTAL	9		7		6		22		

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2023)

Tabel I.3

Daftar Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SLTA/MA	1	1	1	3	2	2	4	6	10
D3	1	-	-	2	-	-	1	2	3
S1	-	2	-	-	1	-	1	2	3
JUMLAH	2	3	1	5	3	2	6	10	16
TOTAL	5		6		5		16		

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2023)

Tabel I.4

Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Diklat Pim II	-	-	-
Diklat Pim III	2	1	3
Diklat Pim IV	1	1	2
Adumla	-	-	-
Spada	-	-	-
TOTAL	3	2	5

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari, 2023)

1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I.5
Daftar Sarana dan Prasarana Prasarana

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Sepeda Motor	36
2	AC	13
3	Televisi	4
4	Spiker	1
5	Sofa Hipnoterapi	1
6	Kamera	2
8	PC Unit	17
9	Notebook	21
10	Printer	33
11	Scanner	1
13	Filling Besi/ Metal	3
14	Lemari Kayu/Buku	8
15	Sofa	1
16	Gorden/Tirai	14
17	Meja Kerja Pegawai	39
18	Kursi Kerja Pegawai	39
19	Meja Rapat	1
21	Papan Plang	1
22	Papan Data/Struktur	0
23	White Board	0
25	Mobil Dinas	2
28	Mobil Pelayanan	2
29	Mobil Penerangan	1
30	Mobil Box Alkon	1

31	Molin	1
32	Laptop	26
33	Proyektor	2

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian (Januari, 2023)

1.7 Keuangan Organisasi

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB pada tahun 2023 berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Pada anggaran murni tahun 2023, Dinas P3AP2KB mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp9,716,959,632** dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp 2,999,613,282** dan belanja barang dan jasa sebesar **Rp 6,508,846,350**, Belanja Hibah **Rp 48,500,000**, Belanja Modal **Rp 160,000,000**.

Pada perubahan anggaran Tahun 2023, Dinas P3AP2KB mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp 10,847,603,091** dengan rincian belanja pegawai **Rp 3,728,859,941**, belanja barang dan jasa sebesar **Rp 6,894,108,150** serta belanja modal sebesar **Rp 32,000,000** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program kegiatan.

Tabel 1.5

Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Murni 2023		Perubahan 2023	
		Anggaran (Rp)	Presentase (%)	Anggaran (Rp)	Presentase (%)
1	Belanja Pegawai	2,999,613,282-,	30,86	3,728,859,941-,	34,37
2	Belanja Barang dan Jasa	6,508,846,350-,	66,98	6,894,108,150-,	63,55

3	Belanja Modal	160,000,000,-	1,64	192,000,000,-	1,76
4	Belanja Hibah	48,500,000,-	0,49	32,635,000	0,30
Jumlah Anggaran		9,716,959,632,-	99,97	10,847,603,091,-	99,98

Sumber: DPPA DP3AP2KB 2023

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan, sebagai berikut:

- 1.1 Landasan Hukum
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Fungsi dan Tugas
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Keadaan Pegawai
- 1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.7 Keuangan Organisasi
- 1.8 Sistematika LKIP

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

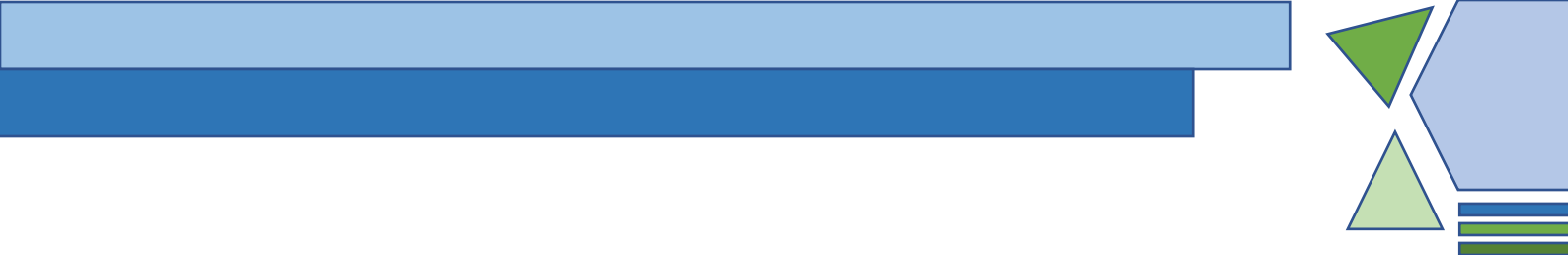
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

- 2.1 Perjanjian Kinerja
- 2.2 Program, sasaran strategis dan indikator target

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan, sebagai berikut:

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Analisis Capaian Kinerja



3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-Akhir Periode
RPJMD/RENSTRA

3.5 Alokasi Sasaran Pembangunan Berdasarkan Cost Per Outcome

3.6 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Cost Per
Outcome

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi :

- *Perjanjian Kinerja*
- *Program, Sasaran Strategis, Indikator Target*

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dan Indikator Tahun 2023 menjadi dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna tidak dibatasi atas kinerja pada tahun 2023, tetapi termasuk kinerja (outcome) tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2023 perjanjian kinerja dilaksanakan dari tingkat kepala dinas, sampai Kepala Bidang, pejabat eselon 1V Dan Pejabat Fungsional.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan untuk memenuhi amanat **Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**, bahwa Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna. Perjanjian ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2023 dan dilaksanakan antara Bupati

Natuna dengan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

Perjanjian Kinerja Dinas P3AP2KB yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,58%
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,25%
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100%
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan sebagai tenaga profesional	46,45%
Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perwakilan Perempuan di Legislatif	0%
Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%

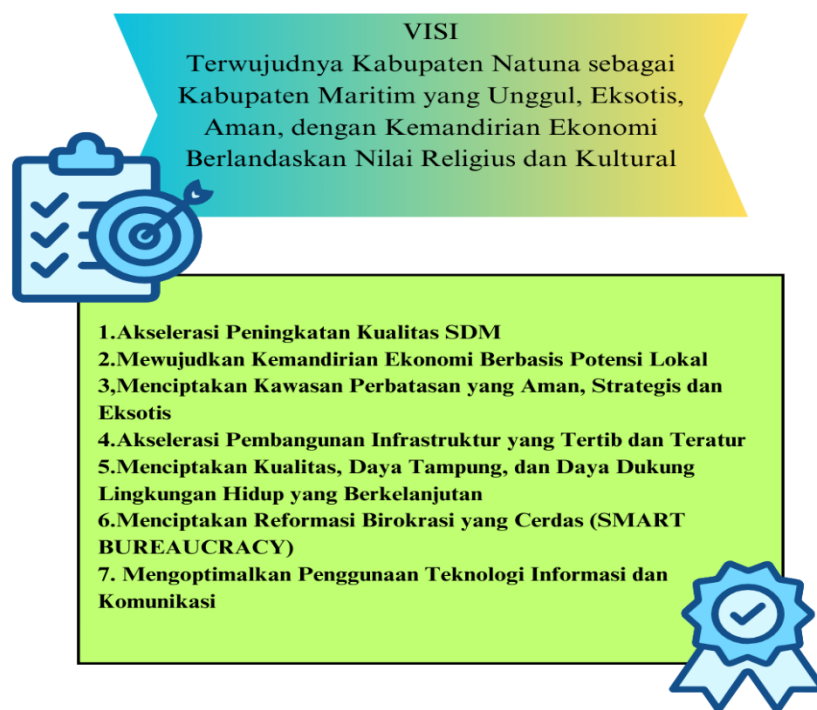
**Rincian Anggaran Dan 9 program Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kabupaten Natuna Tahun 2023, sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran Rp 5,117,050,006,- Sumber : APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Anggaran Rp 410,935,735,- Sumber : APBD	Program Perlindungan Perempuan Anggaran Rp 637,924,000,- Sumber : APBD dan DAK	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Anggaran Rp 176,525,000,- Sumber : APBD	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Anggaran Rp 317,967,740,- Sumber : APBD
Program Perlindungan Khusus Anak Anggaran 402,045,000,- Sumber : APBD dan DAK	Program Pengendalian Penduduk Anggaran 29,250,000,- Sumber : APBD	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Anggaran 3,584,537,590,- Sumber : DAK	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Anggaran 171,368,020,- Sumber : APBD	

Dokumen Perjanjian ini disusun sebagai perwujudan nyata terkait dengan komitmen antara pegawai, dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas P3AP2KB. Penyusunan Renstra merupakan upaya proaktif sebagai tindak lanjut atas Renstra pada dukungan penuh atas capaian Visi dan Misi Bupati Natuna, baik dalam melaksanakan arah pengawasan yang digariskan di tingkat pusat maupun pengawasan bernuansa regional atas pengawasan program pembangunan dilakukan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas P3AP2KB mendukung peningkatan pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD 2021-2025. Visi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Adalah:

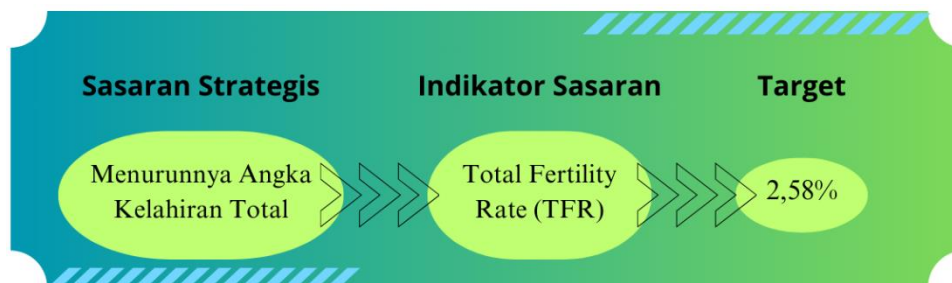


Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas P3AP2KB melaksanakan Misi Bupati dan Wakil Bupati untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

2.2 Program, Sasaran Strategis, dan Indikator Target

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama selanjutnya dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama dengan gambaran target outcome yang akan dicapai.

A. Sasaran Strategis 1



Indikator pengukuran untuk sasaran strategis 1, yaitu:

- 1) Membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program kb pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin.
- 2) Meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak,serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pelaksanaan sasaran strategis 1 didukung oleh 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan, program dan kegiatan yang menjadi pendukung dari sasaran 1, antara lain:

Program : Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Program : Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan: Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan, sebagai berikut:

- a. Kurang pengetahuan masyarakat mengenai manfaatnya KB
- b. Kurangnya Komunikasi informasi Edukasi (KIE) KB di fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan yang ada di lapangan
- c. Kurangnya peningkatan pengetahuan/pelatihan tenaga lini lapangan tentang program KB, SDM terutama PLKB yg jumlahnya masih terbatas
- d. Masih adanya pandangan masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki sehingga sebagian pasangan usia subur (PUS) tidak menggunakan alat kontrasepsi
- e. Rendahnya angka KB pasca persalinan dan pasca keguguran, sehingga

meningkatnya angka terlalu dekat melahirkan anak kurang dari 2 tahun

B. Sasaran Strategis 2



Indikator pengukuran untuk sasaran strategis 2, yaitu:

- 1) Seberapa besar dan lemahnya perempuan berpartisipasi dalam mendapat kesempatan penuh dan efektif dalam kepemimpinan pada setiap jenjang pengambilan keputusan dalam area politik
- 2) Dalam Bidang ekonomi dan mendapatkan kesetaraan gender dalam berbagai bentuk pendidikan dan pendapatan dalam lapangan kerja
- 3) Menjawab permasalahan dalam hal pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memberikan perlindungan secara komprehensif dan optimal dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan

Pelaksanaan sasaran strategis 2 didukung oleh 3 (tiga) program dan 4 (empat) kegiatan, program dan kegiatan yang menjadi pendukung dari sasaran 2, antara lain:

Program : Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- **Kegiatan :** Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Natuna, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program : Program Perlindungan Perempuan

- **Kegiatan :** Penyediaan Layanan Aduan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Program : Peningkatan Kualitas Keluarga

- **Kegiatan :** Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten Natuna

C. Sasaran Strategis 3



Pelaksanaan sasaran strategis 3 didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan, program dan kegiatan yang menjadi pendukung dari sasaran 3, antara lain:

Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- **Kegiatan:** Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan kewenangan kabupaten /kota

Program : Program perlindungan khusus anak

- **Kegiatan :** Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten kota

Sasaran Strategis 3 diharapkan menjawab permasalahan yang terjadi:

- a. Tentang perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan
- b. Memberikan pelayanan secara komprehensif
- c. Menumbuhkan pemahaman penting nya hak korban anak
- d. Menghentikan segala tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

- *Capaian kinerja organisasi*
- *Analisis capaian kinerja*
- *Perbandingan realisasi kinerja 2022-2023*
- *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-akhir periode RPJMD/RENSTRA*
- *Realisasi anggaran*
- *Alokasi sasaran pembangunan berdasarkan Cost Per Outcome*
- *Pencapaian kinerja dan anggaran*
- *Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Cost Per Outcome*

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna yang telah dicapai maupun belum tercapai pada periode/tahun tertentu.

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2023 Menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara Kuantatif dan kuantatif serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap indikator utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

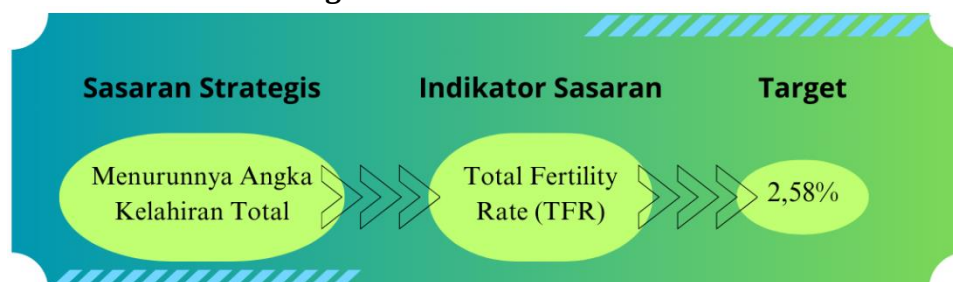
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	2,58	2,43	94,18%
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,52%	24,40 %	99,51%
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,45%	46,56%	100,2%

5.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	5%	0%
6.	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

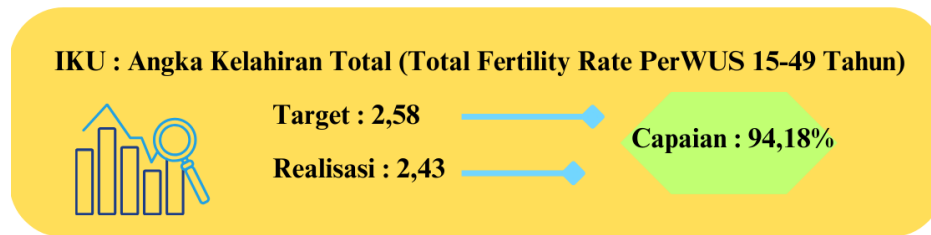
3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja pada Dinas P3AP2KB terhadap capaian kinerja sasaran strategis tercermin dalam capaian sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran program dilakukan dengan mengukur indikator sasaran program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis. Capaian sasaran program difokuskan pada IKU yang merupakan indikator kinerja yang terkait langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

A. Analisis Sasaran Strategis 1



Disajikan grafik sebagai berikut:



Dari grafik diatas, capaian kinerja pada sasaran strategis 1 pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 2,58 dan terealisasi sebesar 2,43, sehingga capaian yang di hasilkan sebesar 94,14%.

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

<i>T F R</i>	=	$T F R = \frac{JK\ 15-49}{JP\ 15-49} \times 100$
<i>Keterangan</i>	:	
<i>TFR</i>	:	<i>Total Fertility Total</i>
<i>JK 15 - 49</i>	:	<i>Banyaknya Kelahiran Dari Perempuan Umur 15 -49 Tahun Periode Tertentu</i>
<i>JP 15- 49</i>	:	<i>Jumlah Penduduk Perempuan Umur 15 -49 Tahun Pertengahan Periode yang sama</i>

Total Fertility Rate Kabupaten Natuna dari tahun ke tahun mengalami penurunan tetapi pada tahun 2023 masih di katakan tinggi, karena target nasional pada tahun 2045 mewujudkan Indonesia emas sebesar 2,1%. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi capaian TFR, yaitu:

- 1) Masyarakat mulai menerapkan KB aktif (jumlah akseptor KB)
- 2) Meningkatnya Jumlah Akseptor KB yang menggunakan Kontrasepsi modern

- 3) Meningkatnya MKJP atau jumlah pengguna Kontrasepsi Metode Jangka Panjang dan Unmet need
- 4) PUS yang tidak mendapatkan pelayanan KB, ASFR 15-19 (Age Spesific Fertility Rate 15-19)
- 5) Jumlah kehamilan dibawah umur (usia anak)
- 6) Anggapan Anak Banyak Anak Banyak Rezeki
- 7) Kurangnya Informasi Tentang Keluarga Berencana
- 8) Penilaian yang tinggi terhadap anak seperti anak seperti anak sebagai penerus, anak sebagai sumber tenaga kerja dan anak sebagai tumpuan hari tua
- 9) Masih banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin punya anak dan ingin punya anak tapi ditunda tetapi tidak mau menggunakan alat kontrasepsi
- 10) Kurangnya komunikasi informasi edukasi (KIE) KB di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan yang ada di lapangan
- 11) Kurangnya peningkatan pengetahuan/pelatihan tenaga lini lapangan tentang program KB
- 12) Sumber daya manusia terutama PLKB yang jumlahnya masih terbatas
- 13) Rendahnya angka KB pasca salin dan pasca keguguran sehingga meningkatnya angka terlalu dekat melahirkan anak dari kurang 2 tahun
- 14) Masih rendahnya KB MKJP sehingga jarak kelahiran dari setiap pasangan usia subur untuk memiliki anak belum maksimal
- 15) Masih rendahnya pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan KB MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)

Indikator Yang Mempengaruhi TFR Tahun 2022 dan Tahun 2023 Dapat Dilhat Pada grafik Berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
 Berencana
 Kabupaten Natuna

35



Dalam RPJMD 2020-2024 bidang kependudukan dan keluarga berencana yang dituangkan dalam renstra BKKBN 2020-2024, ada 5 sasaran program di bidang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Penggunaan Kontrasepsi Modern/mCPR
- 2) Turunnya Total Fertility Rate
- 3) Turunnya Unmet Need/Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi
- 4) Turunnya Age Spesific Fertility Rate/ASFR usia 15- 19 tahun
- 5) Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama /MKJP

Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan untuk penurunan jumlah angka kelahiran antara lain:

- 1) Meningkatkan ketahanan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup serta pembentukan karakter keluarga
- 2) Penguatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai dan mempertahankan bonus demografi yang dapat diwujudkan melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

- 3) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang fokus pada sasaran melalui strategis penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringan/jejaring yang melayani KB dan kesehatan reproduksi, penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup dan peningkatan pelayanan KB pasca salin
- 4) Meningkatkan advokasi dan pergerakan program bangga kencana melalui strategi peningkatan penyebarluasan materi KIE melalui penyuluhan dan media elektronik

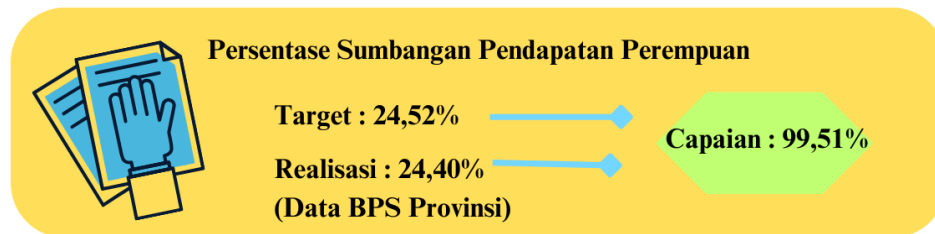
B. Analisis Sasaran Strategis 2

1. Sasaran Strategis 2.1



Dalam Rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan masyarakat, Dinas P3AP2KB melaksanakan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota. Kegiatan PUG adalah bentuk strategi secara rasional dan sistematis dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Disajikan grafik sebagai berikut:



Hal diatas menunjukkan bahwa ada upaya peningkatan perekonomian melalui sumbangan pendapatan perempuan yang semakin meningkat porsinya dibanding laki laki. Peningkatan perekonomian tersebut menunjukkan bahwa ada kesempatan bagi perempuan di bidang ekonomi.meskipun hasil capaian masih berada di bawah target. Salah satu alasan mengapa perempuan banyak berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga karena masih banyak rumah tangga miskin yang dipimpin oleh perempuan. Karena keadaan kemiskinan yang dihadapi dapat menjadi pemicu perempuan untuk ikut serta dalam perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini berusaha mengisi gap tersebut dimana sumbangan pendapatan perempuan menjadi salah satu variabel prediksi. Dari uraian diatas capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar 24,52%, terealisasi 24,40%, sehingga capaian yang di hasilkan sebesar 99,51 %.

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Proporsi angkatan kerja perempuan}}{\text{Rasio Terhadap Rata rata upah}}$
$= \frac{24,52 \%}{24,40\%} \times 100$

Upaya Dinas P3AP2KB dalam meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi
- 2) Memberi pemahaman bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki
- 3) Pelatihan dan keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan
- 4) Mendorong peningkatan di industri rumahan

2. Sasaran Strategis 2.2



Tabel 3.2.1

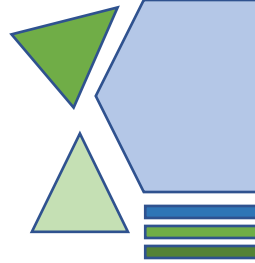
Data Kasus Perempuan yang masuk DI UPTD PPA Tahun 2023

N O	JENIS KASUS	2023	KETERANGAN	STATUS
1	<i>Kekerasan Fisik</i>	0	-	-
2	<i>Kekerasan Psikis</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
3	<i>Kekerasan Ekonomi/ Penelantaran</i>	3	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
4	<i>Kekerasan Fisik dan Psikis / KDRT</i>	11	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
5	<i>Kekerasan Seksual</i>	0	-	-

6	<i>Mengganggu ketertiban masyarakat</i>	0	-	-
7	<i>Perebutan Hak Asuh Anak</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
8	<i>Traffiking</i>	0	-	-
11	<i>Pencemaran Nama Baik</i>	0	-	-
12	<i>Pelecehan Seksual</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
13	<i>Kekerasan Berbasis Gender Online</i>	0	-	-
14	<i>Persetubuhan</i>	2	<i>Terlayani</i>	<i>1 kasus masih dalam proses penyidikan</i>
15	<i>Lainnya (Konseling biasa)</i>	51	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
JUMLAH		70		

Dari berbagai jenis kasus di atas korban kekerasan terhadap perempuan ditangani oleh UPTD PPA. Adapun tahapan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai berikut:

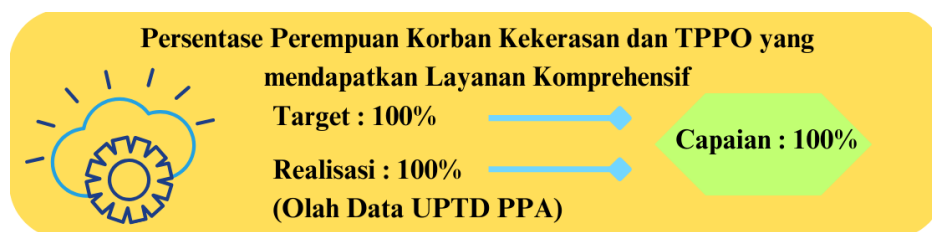
- 1) Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat
- 2) UPTD PPA Kabupaten Natuna memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya
- 3) UPTD PPA Kabupaten Natuna selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi
- 4) Pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan
Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah



Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban

- 5) Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA Kabupaten Natuna ke rumah sakit terdekat yang berjangkauan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Natuna untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
- 6) Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA Kabupaten Natuna mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian
- 7) Proses pendaftaran perempuan korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari UPTD PPA Kabupaten Natuna agar segera ditangani kesehatannya
- 8) Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan perempuan korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali
- 9) Adanya pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Natuna berupa pendampingan psikologi

Analisis sasaran strategis disajikan pada grafik sebagai berikut:



Maka dari uraian di atas, sasaran strategis 2.2 pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan 100%, sudah terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian yang di hasilkan 100%. **Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:**

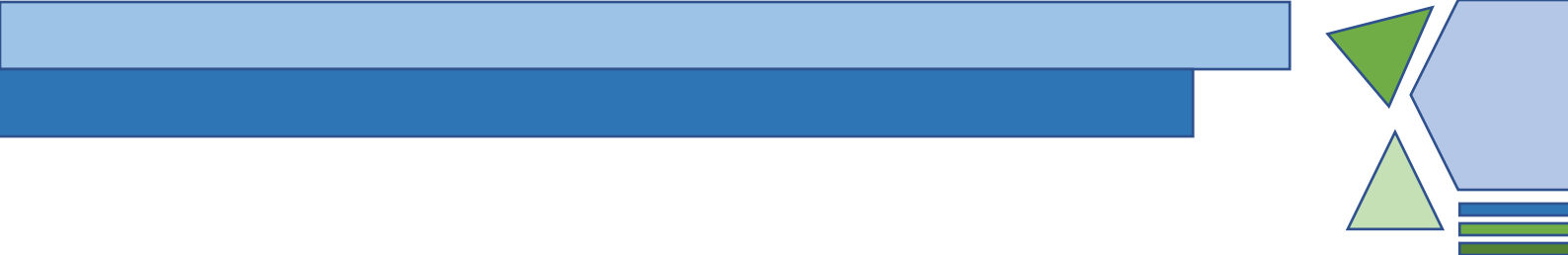
$$\frac{\text{Jumlah pengaduan laporan yang masuk ke unit pelayanan}}{\text{Jumlah pengaduan laporan yang di tindak lanjuti di unit pelayanan}} \times 100$$
$$= \frac{100}{100} \times 100 \%$$

Capaian = 100 %

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kejahatan, pemerintah dan seluruh warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan sesuai tanggung jawabnya masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun komunitas dan satgas merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dimaksimalkan:

- 1) Catat dan laporkan kepada polisi, lembaga pemerhati perempuan dan rumah sakit, puskesmas, (UPTD PPA) atau kepada siapa saja yang bisa membantu. Langkah ini penting, supaya korban segera memperoleh pertolongan dan keadilan bisa ditegakkan
- 2) Dorong media agar bekerja sesuai kode etik. Media dianjurkan menggunakan kode etik jurnalistik ketika menulis kasus kekerasan terhadap perempuan,



seperti jangan sebut nama korban (apalagi kalau masih hidup) atau informasi pribadi korban (seperti desa, alamat, sekolah, atau tempat kerja). Jangan mempublikasikan foto korban jika belum disetujui oleh keluarga (seperti orang tua atau pasangan), kemudian Media juga perlu memikirkan secara baik-baik apakah kronologis kejadian perlu dipublikasikan secara rinci. Jika tidak perlu, maka jangan diterbitkan

- 3) Edukasi kepada masyarakat. Masih banyak orang yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sebuah isu yang penting. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) sebagai peristiwa biasa dan wajar terjadi. Kita harus mengubah pola pikir tersebut, mengajak teman dan keluarga membahasnya. Katakan kepada mereka kasus KtP/A bukan peristiwa sepele dan harus segera dibantu

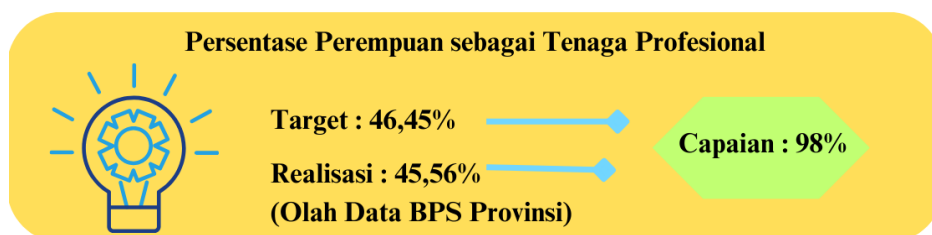
Sesuai Dengan Arahan Presiden pada tanggal 4 Januari 2022 mempertegas bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama, yang sangat mendesak, dan harus segera ditangani. Semua pihak harus melakukan gerakan bersama untuk mencegah tindak kekerasan tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan memberikan kepastian hukum, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Sasaran Strategis 2.3



Analisis sasaran strategis disajikan pada grafik sebagai berikut:



Perempuan di zaman dulu masih sangat kesulitan mendapatkan haknya untuk bekerja karena terbelenggu budaya patriarki. Namun seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, persentase perempuan pekerja pun terus meningkat dewasa ini. Pendidikan perempuan berdampak pada status pekerjaan dan penghasilan.

Pengalaman kerja formal dan suatu pengalaman dalam keluarga mempengaruhi seorang perempuan dapat mencapai dan bergerak pada posisi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Keluarga yang berpengalaman bekerja sebagai pengambil keputusan cenderung berpengaruh pada perempuan dalam keluarga itu untuk mencapai posisi sebagai pengambil keputusan, seperti manajer dan profesional. Teori mengajukan bahwa lingkungan keluarga dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama mempunyai suatu dampak yang signifikan terhadap keberhasilan karier mereka.

Ukuran keluarga mempunyai suatu dampak negatif pada pencapaian karier seorang perempuan karena dipengaruhi oleh struktur sosial atau faktor ekonomi.

Perempuan sebagai tenaga profesional adalah perempuan yang menduduki jabatan manager, profesional, administrasi dan teknisi. Pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar **46,45 %**, terealisasi sebesar **46, 56 %**, sehingga capaian **98%**. Hal ini menunjukkan upaya memastikan perempuan berpartisipasi dan mendapat kesempatan penuh dan efektif dalam kepemimpinan pada setiap jenjang pengambilan keputusan dalam area politik, dan ekonomi.

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut :

$\frac{\text{pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$
$= 46,45 \% / 46,56 \% \times 100$
Capaian = 100,2 %

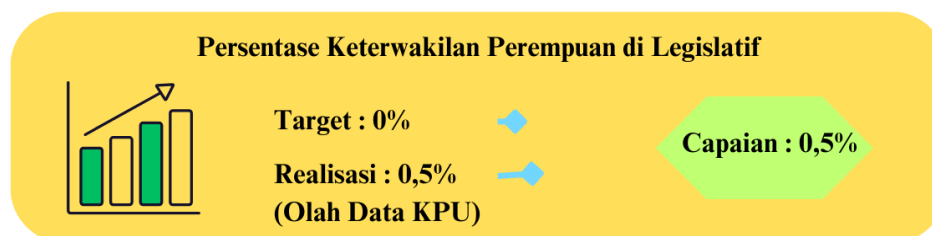
Dinas P3AP2KB terus melakukan strategi dalam menjadikan perempuan sebagai tenaga profesional melalui:

- 1) Pengembangan industri rumahan melalui Industri rumahan
- 2) Pembinaan dan pelatihan pengembangan dalam pengetahuan tentang tata boga
- 3) Terus memberikan sosialisasi perempuan dapat berproduksi tanpa harus meninggalkan rumah
- 4) Terus melakukan pelatihan industri rumahan yang dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja
- 5) Terus melakukan sosialisasi adanya kemajuan teknologi, maka produk industri rumahan ini dapat dipasarkan dari rumah melalui internet

4. Sasaran Strategis 2.4



Analisis sasaran strategis disajikan pada grafik sebagai berikut:



Pada tahun 2023 keterlibatan perempuan dalam legislatif telah diduduki 1 orang perempuan dengan proses pengganti antar waktu bukan melalui pemilihan umum. Minimnya keterwakilan wanita dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan wanita dalam legislatif. Budaya ini memandang bahwa wanita itu lemah dan lebih memposisikan wanita sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan wanita untuk berpartisipasi dalam politik.

Menghadapi hal demikian, pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterwakilan wanita dalam

legislatif. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008, merupakan UU yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Dalam dua undang-undang tersebut, wanita memiliki kuota sebesar 30% untuk turut serta di dalam legislatif. Sedangkan, parpol berperan untuk mengakomodir keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui ketentuan tersebut, wanita dapat turut berpartisipasi dalam legislatif, sejajar dengan laki-laki. Pada Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 0%, terealisasi 0,5%, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 0%.

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Anggota Legislatif Perempuan}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Legislatif}} \times 100 \\ & = \text{Olah Data Kpu} \\ & = \frac{1}{20} \times 100 \% \\ \text{Capaian} & = 0,5 \% \end{aligned}$$

Upaya pemerintah Kabupaten Natuna dan Dinas P3AP2KB terus mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam parlemen maka dibuat beberapa program dan kegiatan diantaranya:

- 1) Bimbingan Teknis peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Natuna
- 2) Pembinaan organisasi–organisasi perempuan dibidang sosial politik terus dilakukan oleh Dinas P3AP2KB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dibidang politik
- 3) Perlu sinergitas serta komitmen yang kuat dari pemerintah, parpol, maupun dari perempuan itu sendiri agar mau terus berusaha menjadi perempuan

berdaya saing

C. Analisis Sasaran Strategis 3



Tabel 3.7

Data Kasus Perempuan Yang Masuk DI UPTD PPA Tahun 2023

NO	JENIS KASUS	2023	KETERANGAN	STATUS
1	<i>Pemeriksaan</i>	0	-	-
2	<i>Pelecehan Seksual</i>	0	-	-
3	<i>Kekerasan Fisik</i>	0	-	-
4	<i>Kekerasan Psikis</i>	0	-	-
5	<i>Kekerasan fisik dan psikis</i>	4	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
6	<i>Pencurian</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
7	<i>pedofil</i>	0	-	-
8	<i>Narkotika dan zat adiktif lainnya</i>	0	-	-
9	<i>Trafficking</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
10	<i>Pornografi</i>	0	-	-

11	<i>Prostitusi</i>	0	-	-
12	<i>Kenakalan Remaja</i>	3	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
13	<i>Lakalantas</i>	0	-	-
14	<i>LGBT</i>	0	-	-
15	<i>Malapraktik</i>	0	-	-
16	<i>Pencabulan</i>	4	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
17	<i>Persetubuhan</i>	9	<i>Terlayani</i>	<i>2 kasus masih dalam proses Penyidikan</i>
18	<i>Penelantaran</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
19	<i>Kekerasan seksual</i>	0	-	-
20	<i>Bullying</i>	15	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
21	<i>ITE</i>	1	<i>Terlayani</i>	<i>kasus masih dalam proses penyidikan</i>
22	<i>Perebutan Hak Asuh Anak</i>	2	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
23	<i>Penganiayaan</i>	5	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
24	<i>Lainnya (Konseling Biasa)</i>	56	<i>Terlayani</i>	<i>Selesai</i>
JUMLAH		102		

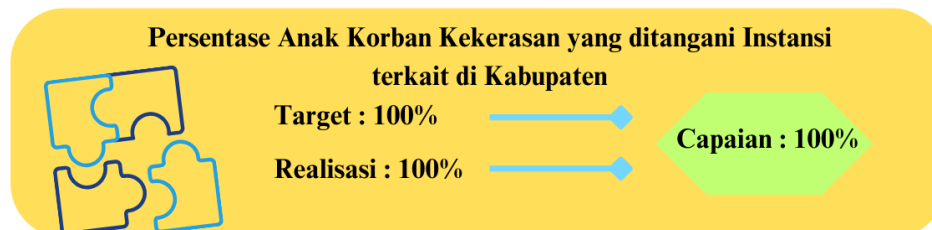
Dinas P3AP2KB menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat. Upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui gerakan PATBM.

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan

perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Melalui PATBM, akan dilakukan sejumlah kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Sinergitas lembaga desa/perangkat desa, posyandu, sekolah, kader KB, PATBM desa lain, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat dibutuhkan.

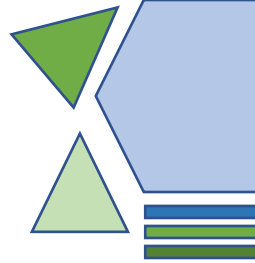
Dalam rangka memberikan pelayanan maksimal UPTD PPA fokus dan tanggung jawab pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam SPM.

Analisis sasaran strategis disajikan pada grafik sebagai berikut:



Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi 100%, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan laporan yang masuk ke unit pelayanan}}{\text{Jumlah pengaduan laporan yang di tindak lanjuti di unit pelayanan}} \times 100$$



	$= \frac{102}{102} \times 100 \%$
Capaian	$= 1 \times 100 \%$

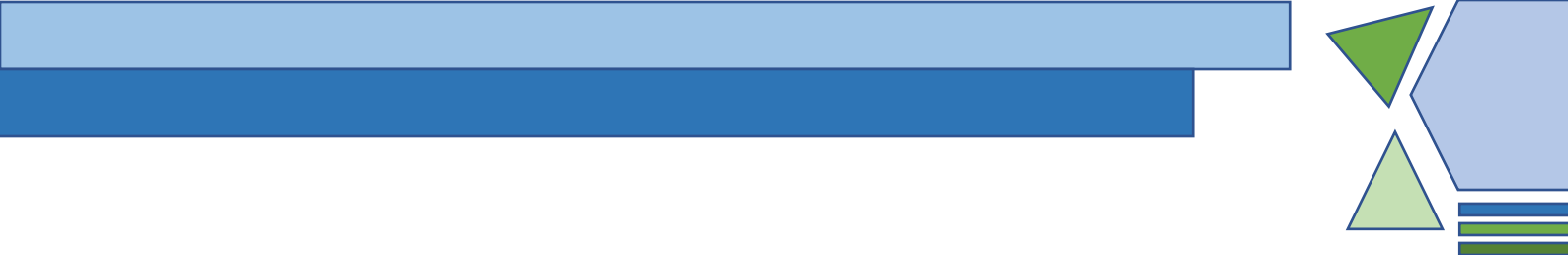
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2023 merupakan Bantuan Operasional Perlindungan Anak Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA. Pencegahan adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak.

Upaya melindungi anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga Masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian, penyediaan layanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya yaitu keterbatasan anggaran daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak.

Faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terus meningkat antara lain:

- 1) Masih banyaknya daerah kabupaten/kota dan Desa/Kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM
- 2) Minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/aktivis/pemerhati anak yang terlatih PATBM sehingga SDM potensial untuk pengembangan PATBM





masih sangat terbatas sementara isu anak sangat banyak termasuk problematikanya

- 3) Minimnya anggaran terkait PATBM perlu solusi cerdas terhadap aksesibilitas sumber–sumber pendanaan yang ada dalam rangka penyediaan sarana prasarana dan fasilitas untuk meningkatkan layanan di masyarakat, termasuk media KIE
- 4) Keberhasilan PATBM menunjukkan ada nilai-nilai dalam masyarakat yang bisa dipromosikan dan diintegrasikan dalam PATBM agar anak terhindar dari kekerasan, misal agama dan budaya tradisional
- 5) Dukungan dari para penggerak kegiatan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh penggiat aktivis anak dan keluarga yang ada di sekitar lingkungan desa/kelurahan PATBM, sehingga sinergitas yang terbentuk dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang telah ada sangat diperlukan

Kegiatan yang telah di laksanakan Dinas P3AP2KB dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Kabupaten Layak Anak tingkat madya
- 2) Penguatan PATBM
- 3) Penguatan satuan tugas bebas kekerasan terhadap anak
- 4) Penguatan sekolah ramah anak
- 5) Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) melalui sosialisasi pola asuh bagi keluarga
- 6) Penguatan Forum Anak Kabupaten, kelurahan, desa dan puskesmas ramah anak

Diharapkan hal diatas dapat terus menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Natuna.

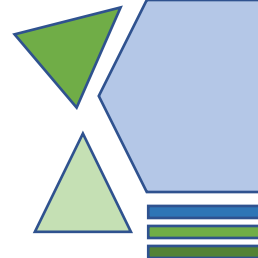
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Indikator	
				2022	2023
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) PerWUS 15-49 Tahun	2,58	2,76	2,43
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,52%	24,30%	24,40%
3	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Indikator	
				2022	2023
4	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,45%	51,11%	46,56%
5	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	0%	0,5%
6	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, dapat dideskripsikan bahwa realisasi kinerja Dinas P3AP2KB:

- 1) Tahun **2022 dan 2023** dapat diperbandingkan bahwa terdapat pencapaian target dari sasaran strategis **1,2,3,4,5,6**
- 2) Selain itu juga terdapat peningkatan realisasi yang signifikan Indikator 1 dengan target **2,58** pada Tahun **2022**, terealisasi sebesar **2,76** turun dari tahun **2023** sebesar **2,43**. Tingkat keberhasilan TFR semakin turunnya realisasi capaian berarti keberhasilan dalam tingkat laju pertumbuhan



penduduk

- 3) Indikator 2 dengan target **24,52%** pada tahun **2022** terealisasi sebesar **24,30%** dan pada tahun **2023** naik dari tahun **2022** menjadi **24,40%**
- 4) Indikator 3 telah mencapai target. Indikator 3 dengan target **100%** terealisasi **100%**
- 5) Indikator 4 dengan target **46,45%** pada tahun **2022**, dan pada tahun **2023** **46,56 %**. Hal tersebut sudah hampir mencapai target RENSTRA
- 6) Indikator 5 Dari tahun **2022 0%** dan pada tahun **2023** ada kenaikan menjadi **5 %** adanya keterwakilan perempuan dipilih melewati pengganti antar waktu
- 7) Indikator 5 dengan target **100%**, terealisasi **100%** tahun **2023** dan selalu mencapai target yang telah ditentukan.

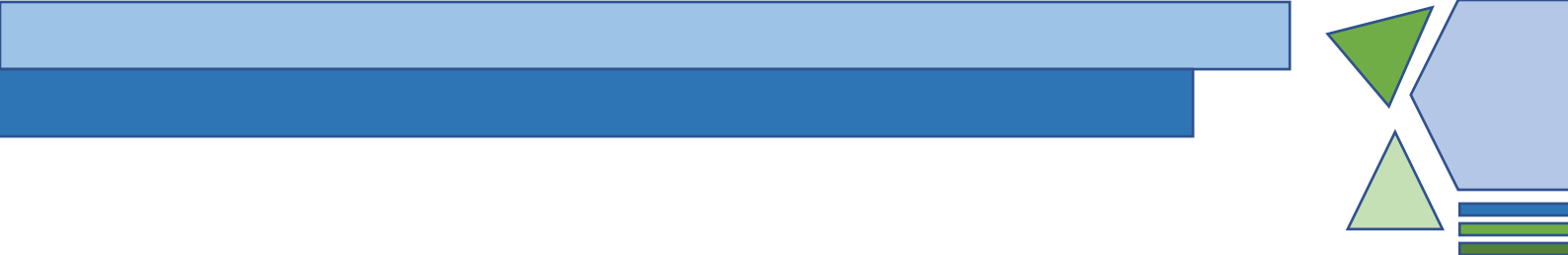
Dengan melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja, Dinas P3AP2KB ada beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang sudah ditentukan dan ada juga beberapa indikator hampir mencapai target yang di tentukan. Perkembangan target indikator, realisasi, dan capaian kinerja dari sasaran strategis antara tahun 2022 dan tahun 2023 adanya kenaikan yang signifikan.

Dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Maka diperlukan tahapan selanjutnya dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) PerWUS 15-49 Tahun	2,30	2,43	105.6
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,55%	24,40%	99,38%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan	100%	100%	100%



Dan Perlindungan Perempuan	TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif			
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,40%	46,56 %	100,3%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	0,5%	0%
Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

Dari penjelasan diatas, maka dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

- 1) Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat pada **Sasaran Strategis/ IKU ke-3 sebesar 100%**
- 2) **Sasaran Strategis / IKU ke – 6 sebesar 100%**
- 3) **Sasaran Strategis 2 / IKU Ke -2** Hampir mencapai target Renstra
- 4) Perlambatan tingkat kemajuan terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-5 sebesar **0%**

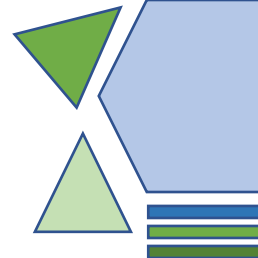
Realitas tersebut merupakan sebuah tolok ukur bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna untuk menentukan posisi pada saat ini, agar target 5 tahun mendatang dapat tercapai. Maka, dibutuhkan langkah tindak lanjut dan strategi agar dapat memenuhi target tersebut. Upaya tindak lanjut tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Natuna 2021-2026, dimana di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Visi Bupati Natuna dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna adalah *“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandiri-isuan Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius Dan Kultural.”*

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna sesuai dengan fungsinya mendukung pencapaian keberhasilan visi dan misi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Peran serta tersebut diwujudkan dalam dukungan pada misi ke-2, yaitu:

“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas ,Sehat Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman Dan Takwa“.

Terwujudnya Pembangunan Manusia yang unggul, berkarakter dan berkualitas serta meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

3.5 Realisasi Anggaran



Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam hal ini Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (financial accountability) berupa laporan keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability).

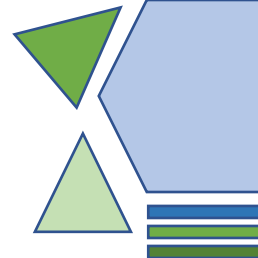
Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2022 dan 2023 Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna mendapatkan Pagu Anggaran Sebagai Berikut:

2022	2023	Selisih
Rp 8,827,563,595,00	Rp 10,847,603,091,00	Rp 2,020,039,496,00

Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2023 maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada **8 (delapan) program** yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu: Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bidang





Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya Dinas P3AP2KB ingin menjelaskan tentang ***pengukuran cost per outcome*** pada organisasi sektor publik adalah bahwa pembuat kebijakan sektor publik perlu melakukan perencanaan dan pengendalian atau pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka perlu membuat pertimbangan mengenai kinerja program sektor publik di masa lalu dan mengenai alokasi sumber daya di masa yang akan datang. Untuk melakukan pengendalian, pengukuran outcome memiliki dua peran, yaitu pengendalian masa lalu (retrospective) dan pengendalian masa depan (prospective).

Perkembangan manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil menjadikan pengukuran outcome menjadi sangat penting. Pengukuran outcome tersebut memungkinkan manajer publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitasnya secara lebih baik pada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran yang hanya berfokus pada input misalnya staf dan anggaran dan output aktivitas program, jumlah orang yang dilayani, dan sebagainya belum dapat menunjukkan efektivitas program. Pengukuran efektivitas menuntut adanya spesifikasi tujuan karena hasil yang diharapkan, pencapaiannya diukur dengan outcome.

Alokasi anggaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2023 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ Cost Per Outcome) dapat dilihat pada Tabel. Didalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/keseluruhan anggaran (Belanja Langsung (ex.rutin) dan Belanja Tidak Langsung (pembangunan) pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2023.

3.6 Alokasi sasaran Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berdasarkan Cost Per Outcome)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

60



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Rp) Anggaran	(%) Anggaran
<i>Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Nilai Lakip</i>	37,712.428,00	0,34
<i>Indeks Pelayanan Publik</i>	<i>Meningkatnya Kepuasan Masyarakat</i>	5,117,050,006,00	47,17
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	3,705,155,610,00	34,15
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	178,353,495,00	1,64
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	637,924,000,00	5,8
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	176,525,000,00	0.10
Meningkatkan	Persentase Keterwakilan		2,14

Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Perempuan Di legislatif	232,582,240,00	
Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	720,012,740,00	6,63

Didalam penjelasan diatas, dapat dideskripsikan bahwa Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan yang terbesar pada **Sasaran Strategis 1 (Angka Kelahiran Total/TFR)** sebesar **34,15%** atau **Rp,3,705,155,610** Bersumber Dari dana DAK . sedangkan Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan Baersumber Dari APBD Dan DAK Pada **Sasaran Strategis 3 (Persentase anak korban kekerasan instansi terkait)**Sebesar **6,63** atau **720.012,740,00** yang terkecil pada **Sasaran Strategis 2 (dengan indikator persentase perempuan sebagai tenaga profesional)** sebesar **0,10 %** atau **Rp 176,525,000,00**

Selain hal tersebut, untuk mengukur efisiensi antara kinerja dan anggaran, maka perlu diperbandingkan antara pencapaian kinerja dengan anggaran pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, yang secara sistematis dijelaskan di bawah ini.

3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023 (Berdasarkan Cost Per Outcome)

Sasaran dan program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15- 49 Tahun	2,58	2,43	98,14%	3,705,155,610,00	3,373,193,060	91,04%
Meningkatkan Keseimbangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,52%	24,40 %	99,51%	178,353,495,00	137,637,910	77,17%
Meningkatkan Keseimbangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	637,924,000,00	541,767,475	84,92%
Meningkatkan Keseimbangan Gender Pemberdayaan Dan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,45%	46,56%	100,2%	176,525,000,00	149,741,800	84,83%

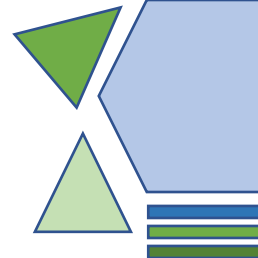
Perlindungan Perempuan							
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif	0%	0,5%	0%	232,582,240,00	204,184,734	88,27%
Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%	720.012,740,00	650,563,423	90,35%

3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023

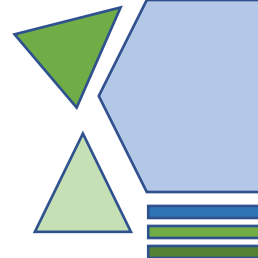
(Berdasarkan Cost Per Outcome / Sumber daya program yang dikonsumsi untuk mencapai suatu perubahan yang diharapkan)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
----	---------	-------------------	--	--------------------------	-------------------



1	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /Tfr) Perwus 15-49 Tahun	98,14%	91,04%	8,6%
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	99,51%	77,17%	22,83%
3	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan Tppo Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	84,92%	15,08 %
4	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	100,2%	84,83%	15,17 %





	Perlindungan Perempuan				
5	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di Legislatif	0%	88,27%	11,73%
6	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Di Tangani Instansi Terkait	100%	90,35%	9,65%



BAB IV

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

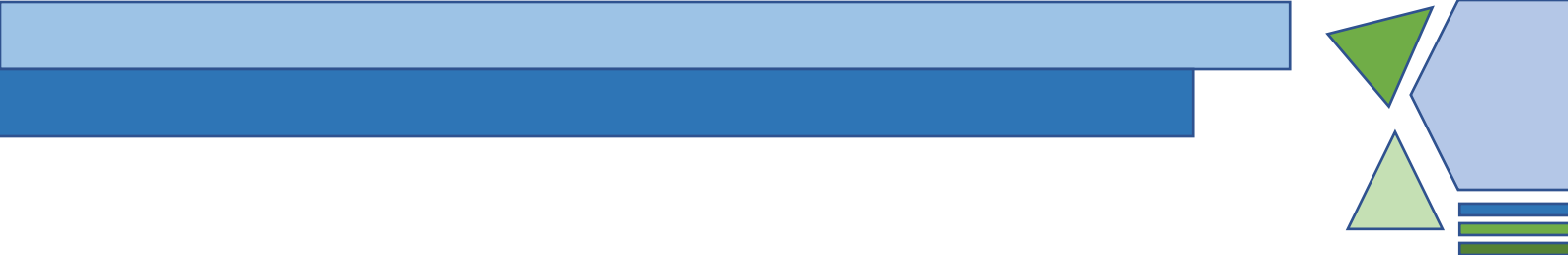
- *Kesimpulan*
- *Rencana tindak lanjut*

4.1 Kesimpulan

Dalam rangka menuju Kabupaten Natuna yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing, maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan evaluasi yang holistik. Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

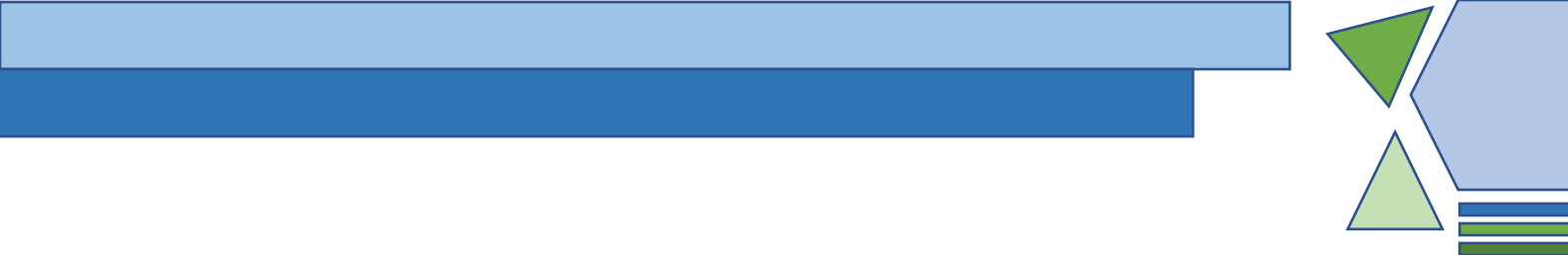
Sesuai dengan visi Kabupaten Natuna 2021-2026, Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-1, yaitu Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuknya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetensi dalam mendukung pembangunan secara operasional memenuhi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas daya saing tenaga kerja sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah.

Selain mengacu pada sasaran strategis tersebut, penetapan (IKU) juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna antara lain:

- 
1. Rendahnya Kualitas SDM Perempuan;
 2. Belum optimalnya pelaksanaan program yang responsif gender;
 3. Belum maksimalnya pembangunan berwawasan kependudukan dan perencanaan kehamilan ;
 4. Masih perlunya peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kontrasepsi (KB) dan perencanaan kehamilan ;
 5. Belum maksimalnya program ketahanan keluarga yang bisa menjaga kualitas setiap anggota keluarga dan ketahanan remaja;
 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender;

Tahun 2023 Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan sesuai arahan Presiden menekan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Upaya yang dilaksanakan sedikit banyak telah menunjukkan hasil yang positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023.

Dalam tata kelola keuangan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/penganggaran (cost effectiveness) dapat meningkat. Optimalisasi pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud kelancaran dalam bekerja dan mengambil keputusan, selfdriving/seni memimpin diri sendiri, nilai-nilai budaya instansi, dan softskills lainnya yang dimiliki oleh SDM aparatur. Maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh



(learning organizational) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fundamental/dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

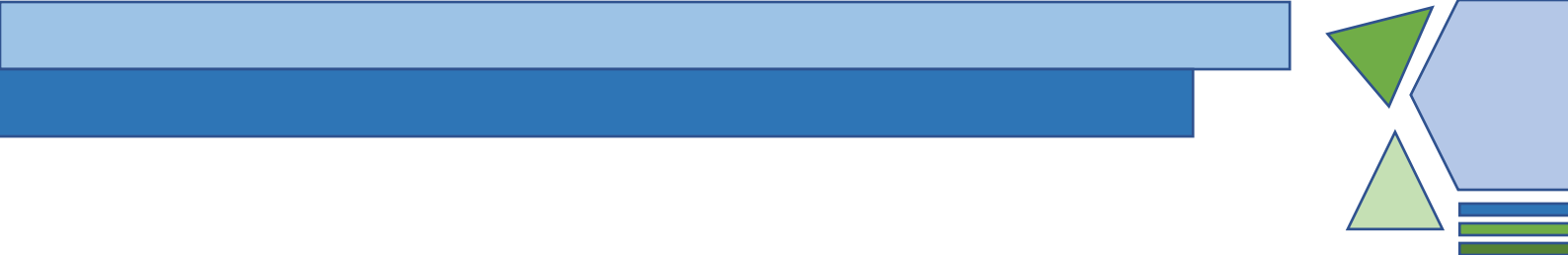
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Natuna.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan yang dicapai berkat adanya kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan DP3AP2KB tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

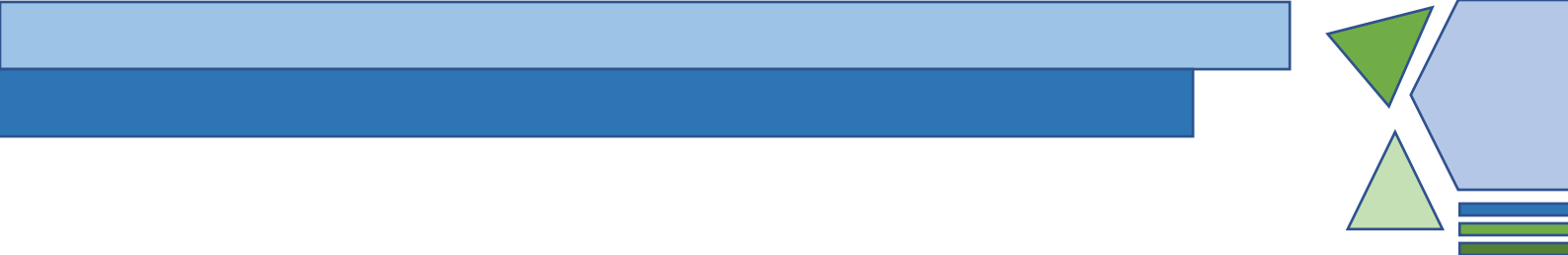
1. Dari analisis ketiga sasaran, terdapat tiga indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, Ketiga indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar $>100\%$, yaitu sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun, kekerasan terhadap anak menurun dan jumlah penduduk terkendali.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing– masing sasaran adalah sebagai berikut:

- 
- a. Sasaran kekerasan terhadap perempuan menurun dengan capaian 100,00% dengan efisiensi anggaran 5,63%
 - b. Sasaran kekerasan terhadap anak menurun dengan capaian 145,45% dengan efisiensi anggaran 1,84%
 - c. Sasaran jumlah penduduk terkendali dengan capaian 163,18% dengan efisiensi anggaran 3,99%
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja seperti seiring jumlah kekerasan yang cenderung meningkat, dan tingginya kepesertaan KB tradisional.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Optimalisasi KIE pada forum Fapsedu dan kegiatan di kampung KB
- b. Koordinasi dengan OPD dan instansi terkait
- c. Meningkatkan koordinasi lintas OPD/instansi antara lain Dinas Sosial, tenaga Kerja, dan Transmigrasi, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), PSM, UPT PPA, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Instansi vertikal, LSM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk sinergitas yang lebih baik
- d. Melaksanakan penguatan lembaga kemasyarakatan seperti PATBM, Kelana, Dekelana dan SRA untuk meminimalisir terjadinya kekerasan anak
- e. Meningkatkan peran Puspaga dalam hal pencegahan melalui edukasi dan parenting maupun penjangkauan kepada anak/keluarga yang bermasalah.

- 
- f. Peningkatan peran Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai wadah untuk konsultasi apabila sebuah keluarga tidak bisa menyelesaikan masalah yang muncul, sehingga tidak berlanjut menjadi tindak kekerasan.
 - g. Peningkatan peran PATBM dan mitra keluarga untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak.
 - h. Penguatan melalui KIE ketahanan keluarga serta KIE melalui bina keluarga

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
LAPORAN REALISASI RINCIAN BULAN DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SKPD : 2.08.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
Unit Kerja : [SEMUA]

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
02. BL		10,847,603,091.00	10,012,641,593.00	834,961,498.00	92.30
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,712,428.00	23,710,350.00	14,002,078.00	62.87%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,712,428.00	23,710,350.00	14,002,078.00	62.87%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	582,680.00	500,000.00	82,680.00	85.81%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	50.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,001,568.00	250,392.00	751,176.00	25.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,128,180.00	21,959,958.00	12,168,222.00	64.35%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,742,859,941.00	3,697,314,195.00	45,545,746.00	98.78%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,742,859,941.00	3,697,314,195.00	45,545,746.00	98.78%
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1,144,256,000.00	1,114,223,500.00	30,032,500.00	97.38%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	67,453,000.00	67,452,560.00	440.00	00.00%
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	95,415,200.00	94,870,000.00	545,200.00	99.43%
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	98,583,000.00	92,988,000.00	5,595,000.00	94.32%
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,228,000.00	20,610,000.00	618,000.00	97.09%
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	52,136,000.00	51,925,140.00	210,860.00	99.60%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,306,000.00	800,618.00	505,382.00	61.30%
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	516,000.00	15,249.00	500,751.00	2.96%
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	104,265,000.00	103,529,461.00	735,539.00	99.29%
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,809,000.00	2,293,082.00	515,918.00	81.63%
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7,427,000.00	6,879,158.00	547,842.00	92.62%
5.1.01.01.12.0001.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	715,500,066.00	715,118,800.00	381,266.00	99.95%
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1,075,098,085.00	1,072,683,192.00	2,414,893.00	99.78%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	351,867,590.00	349,968,598.00	1,898,992.00	99.46%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4,500,000.00	3,956,837.00	543,163.00	87.93%
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,540,000.00	38,438,442.00	10,101,558.00	79.19%
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,540,000.00	38,438,442.00	10,101,558.00	79.19%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00%
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18,000,000.00	16,245,000.00	1,755,000.00	90.25%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,000,000.00	22,193,442.00	7,806,558.00	73.98%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533,785,637.00	482,521,655.00	51,263,982.00	90.40%
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,958,287.00	17,322,600.00	1,635,687.00	91.37%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18,958,287.00	17,322,600.00	1,635,687.00	91.37%
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,264,000.00	2,253,700.00	10,300.00	99.55%
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2,264,000.00	2,253,700.00	10,300.00	99.55%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000.00	3,450,000.00	4,550,000.00	43.13%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,000,000.00	3,450,000.00	1,550,000.00	69.00%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,736,000.00	2,280,000.00	456,000.00	83.33%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,736,000.00	2,280,000.00	456,000.00	83.33%
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	10,500,000.00	9,800,000.00	700,000.00	93.33%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10,500,000.00	9,800,000.00	700,000.00	93.33%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	491,327,350.00	447,415,355.00	43,911,995.00	91.06%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	416,194,350.00	380,381,355.00	35,812,995.00	91.40%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66,883,000.00	58,784,000.00	8,099,000.00	87.89%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192,000,000.00	176,560,000.00	15,440,000.00	91.96%
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	11,000,000.00	10,800,000.00	200,000.00	98.18%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	11,000,000.00	10,800,000.00	200,000.00	98.18%
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181,000,000.00	165,760,000.00	15,240,000.00	91.58%
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	43,000,000.00	39,660,000.00	3,340,000.00	92.23%
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	123,000,000.00	121,100,000.00	1,900,000.00	98.46%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	00.00%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390,082,000.00	384,680,939.00	5,401,061.00	98.62%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	66.67%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	66.67%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,000.00	332,000.00	668,000.00	33.20%
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1,000,000.00	332,000.00	668,000.00	33.20%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383,082,000.00	380,348,939.00	2,733,061.00	99.29%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	352,136,000.00	351,680,000.00	456,000.00	99.87%
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26,496,000.00	25,496,880.00	999,120.00	96.23%
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2,000,000.00	1,345,722.00	654,278.00	67.29%
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2,450,000.00	1,826,337.00	623,663.00	74.54%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,070,000.00	152,327,610.00	19,742,390.00	88.53%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,000,000.00	85,311,700.00	16,688,300.00	83.64%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28,000,000.00	24,390,000.00	3,610,000.00	87.11%
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30,000,000.00	16,921,700.00	13,078,300.00	56.41%
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,070,000.00	67,015,910.00	3,054,090.00	95.64%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,800,000.00	1,475,910.00	324,090.00	82.00%
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	53,570,000.00	51,090,000.00	2,480,000.00	95.37%
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,200,000.00	6,000,000.00	200,000.00	96.77%
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8,500,000.00	8,450,000.00	50,000.00	99.41%
02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	178,353,495.00	137,637,910.00	40,715,585.00	77.17%
02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	178,353,495.00	137,637,910.00	40,715,585.00	77.17%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,616,000.00	7,243,400.00	372,600.00	95.11%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,750,000.00	2,640,000.00	5,110,000.00	34.06%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21,000,000.00	14,700,000.00	6,300,000.00	70.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1,920,000.00	1,728,000.00	192,000.00	90.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68,127,495.00	62,886,510.00	5,240,985.00	92.31%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000.00	4,200,000.00	7,800,000.00	35.00%
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,240,000.00	42,240,000.00	0.00	00.00%
02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	261,832,240.00	231,107,434.00	30,724,806.00	88.27%
02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	232,582,240.00	204,184,734.00	28,397,506.00	87.79%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	700,000.00	700,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,902,380.00	5,272,200.00	630,180.00	89.32%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,295,000.00	7,525,000.00	5,770,000.00	56.60%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,800,000.00	11,847,500.00	952,500.00	92.56%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53,746,000.00	51,862,500.00	1,883,500.00	96.50%
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30,800,000.00	19,950,000.00	10,850,000.00	64.77%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	12,500,000.00	11,500,000.00	1,000,000.00	92.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,840,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	50.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,263,860.00	27,522,534.00	3,741,326.00	88.03%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,600,000.00	13,950,000.00	1,650,000.00	89.42%
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32,635,000.00	32,635,000.00	0.00	00.00%
02.2.02.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	29,250,000.00	26,922,700.00	2,327,300.00	92.04%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,725,000.00	1,680,200.00	44,800.00	97.40%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150,000.00	150,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18,750,000.00	18,492,500.00	257,500.00	98.63%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,250,000.00	6,600,000.00	1,650,000.00	80.00%
03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	98,330,000.00	90,683,450.00	7,646,550.00	92.22%
03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65,300,000.00	58,979,400.00	6,320,600.00	90.32%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,000,000.00	1,825,000.00	175,000.00	91.25%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23,050,000.00	22,979,400.00	70,600.00	99.69%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,250,000.00	23,175,000.00	6,075,000.00	79.23%
03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	33,030,000.00	31,704,050.00	1,325,950.00	95.99%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800,000.00	773,250.00	26,750.00	96.66%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150,000.00	150,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	12,080,000.00	11,734,800.00	345,200.00	97.14%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000.00	9,046,000.00	954,000.00	90.46%
03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	794,924,000.00	699,088,075.00	95,835,925.00	87.94%
03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	441,969,000.00	404,979,375.00	36,989,625.00	91.63%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,228,620.00	240,000.00	1,988,620.00	10.77%
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	7,000,000.00	6,975,075.00	24,925.00	99.64%
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,000,000.00	4,993,800.00	6,200.00	99.88%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,000,000.00	7,914,000.00	86,000.00	98.93%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,045,000.00	3,485,000.00	560,000.00	86.16%
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	236,000,000.00	236,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,904,000.00	2,640,000.00	264,000.00	90.91%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	2,400,000.00	1,464,000.00	936,000.00	61.00%
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	2,000,000.00	841,000.00	1,159,000.00	42.05%
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12,000,000.00	6,700,000.00	5,300,000.00	55.83%
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8,000,000.00	5,427,500.00	2,572,500.00	67.84%
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	42,700,000.00	42,700,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6,000,000.00	4,019,000.00	1,981,000.00	66.98%
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,441,380.00	10,980,000.00	8,461,380.00	56.48%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,450,000.00	0.00	12,450,000.00	0.00%
03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	130,655,000.00	77,808,700.00	52,846,300.00	59.55%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,178,170.00	1,630,000.00	4,548,170.00	26.38%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,105,830.00	2,100,000.00	5,830.00	99.72%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,706,000.00	0.00	1,706,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27,775,000.00	12,158,700.00	15,616,300.00	43.78%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	92,890,000.00	61,920,000.00	30,970,000.00	66.66%
03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	222,300,000.00	216,300,000.00	6,000,000.00	97.30%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	222,300,000.00	216,300,000.00	6,000,000.00	97.30%
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3,329,207,590.00	2,940,836,060.00	388,371,530.00	88.33%
03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3,329,207,590.00	2,940,836,060.00	388,371,530.00	88.33%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	360,000,000.00	352,500,000.00	7,500,000.00	97.92%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16,000,000.00	15,900,700.00	99,300.00	99.38%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	153,323,000.00	149,485,000.00	3,838,000.00	97.50%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	49,414,000.00	30,910,000.00	18,504,000.00	62.55%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17,750,000.00	8,550,000.00	9,200,000.00	48.17%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,118,185,000.00	1,034,260,500.00	83,924,500.00	92.49%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	158,100,000.00	108,000,000.00	50,100,000.00	68.31%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	624,500,000.00	528,330,000.00	96,170,000.00	84.60%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2,167,590.00	1,164,360.00	1,003,230.00	53.72%
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	140,400,000.00	127,800,000.00	12,600,000.00	91.03%
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	140,400,000.00	135,000,000.00	5,400,000.00	96.15%
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	39,000,000.00	22,987,500.00	16,012,500.00	58.94%
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	351,000,000.00	323,712,000.00	27,288,000.00	92.23%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,877,000.00	29,561,000.00	3,316,000.00	89.91%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	126,091,000.00	72,675,000.00	53,416,000.00	57.64%
04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242,484,640.00	204,568,850.00	37,915,790.00	84.36%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	176,525,000.00	149,741,800.00	26,783,200.00	84.83%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,721,000.00	1,500,000.00	221,000.00	87.16%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,734,000.00	1,800,000.00	1,934,000.00	48.21%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	65,000,000.00	51,250,000.00	13,750,000.00	78.85%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10,000,000.00	9,960,000.00	40,000.00	99.60%
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	4,000,000.00	1,222,000.00	2,778,000.00	30.55%
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,100,000.00	6,834,800.00	265,200.00	96.26%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49,830,000.00	45,875,000.00	3,955,000.00	92.06%
04.2.01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	65,959,640.00	54,827,050.00	11,132,590.00	83.12%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,505,640.00	1,500,000.00	5,640.00	99.63%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175,000.00	160,000.00	15,000.00	91.43%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300,000.00	300,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9,435,000.00	8,116,750.00	1,318,250.00	86.03%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9,000,000.00	8,400,000.00	600,000.00	93.33%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,154,000.00	22,793,300.00	4,360,700.00	83.94%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,390,000.00	13,557,000.00	4,833,000.00	73.72%
04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105,408,380.00	102,603,200.00	2,805,180.00	97.34%
04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	105,408,380.00	102,603,200.00	2,805,180.00	97.34%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7,138,000.00	7,138,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,910,000.00	2,910,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,000,000.00	1,894,800.00	105,200.00	94.74%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800,000.00	800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,900,000.00	25,516,400.00	383,600.00	98.52%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,380,380.00	13,064,000.00	2,316,380.00	84.94%
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	00.00%
06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	317,967,740.00	296,842,123.00	21,125,617.00	93.36%
06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	317,967,740.00	296,842,123.00	21,125,617.00	93.36%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,387,740.00	4,278,800.00	108,940.00	97.52%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9,250,000.00	9,022,000.00	228,000.00	97.54%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750,000.00	750,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,000,000.00	21,080,500.00	3,919,500.00	84.32%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91,000,000.00	88,702,500.00	2,297,500.00	97.48%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,800,000.00	11,200,000.00	5,600,000.00	66.67%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	300,000.00	300,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	123,560,000.00	115,038,323.00	8,521,677.00	93.10%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,900,000.00	24,450,000.00	450,000.00	98.19%
07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	84,200,000.00	75,922,700.00	8,277,300.00	90.17%
07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	84,200,000.00	75,922,700.00	8,277,300.00	90.17%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28,950,000.00	28,887,700.00	62,300.00	99.78%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4,200,000.00	4,160,000.00	40,000.00	99.05%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	37,350,000.00	29,175,000.00	8,175,000.00	78.11%
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	216,185,000.00	178,372,200.00	37,812,800.00	82.51%
07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	216,185,000.00	178,372,200.00	37,812,800.00	82.51%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,296,000.00	6,880,000.00	5,416,000.00	55.95%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,745,800.00	2,699,000.00	46,800.00	98.30%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,505,000.00	38,360,000.00	12,145,000.00	75.95%
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,012,200.00	5,012,200.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	114,026,000.00	95,221,000.00	18,805,000.00	83.51%
07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101,660,000.00	99,426,400.00	2,233,600.00	97.80%
07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101,660,000.00	99,426,400.00	2,233,600.00	97.80%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,412,000.00	4,390,200.00	21,800.00	99.51%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,840,000.00	1,835,000.00	5,000.00	99.73%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,208,000.00	10,051,200.00	156,800.00	98.46%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16,800,000.00	16,100,000.00	700,000.00	95.83%
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,900,000.00	20,550,000.00	1,350,000.00	93.84%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	00.00%
	TOTAL	10,847,603,091.00	10,012,641,593.00	834,961,498.00	92.30%

Ranai, 29 Desember 2023

Pengguna Anggaran



SRI RIAWATI, SP., M.Si

NIP. 197106042002122002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SRI RIAWATI, SP., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

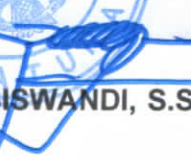
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 08 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



SRI RIAWATI, SP., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.49
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Persen	0,5
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	46.50
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persen	24.53
3.	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100

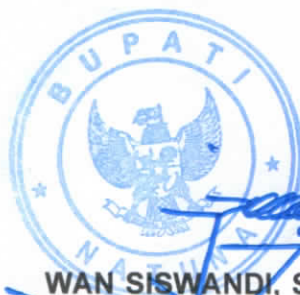
Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.396.229.999,00
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	562.661.700,00
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	574.770.000,00
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp.	224.197.000,00
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	214.348.900,00
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	383.670.000,00
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	30.094.000,00
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.	3.323.788.440,00
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	329.071.032,00
Jumlah	Rp.	10.038.831.071,00

Ranai, 08 Januari 2024

Bupati Natuna,

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana**


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


SRI RIAWATI, SP., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERRY GAPINA, ST**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SRI RIAWATI, S.P., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Ranai, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas,

ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	Predikat/realisasi kinerja PD/nilai SAKIP	Nilai	100
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100
3.	Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase kehadiran pegawai	Persen	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	40.395.600
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Rp.	3.346.668.041
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	58.527.570
4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp.	369.318.360
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	389.660.428
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	191.640.000
JUMLAH	Rp.	4.396.209.999

Ranai, 12 Januari 2024



Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Pihak Pertama,
Sekretaris Dinas,

ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **dr. IMAM SYAFARI, MPH**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SRI RIAWATI, S.P., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana**

dr. IMAM SYAFARI, MPH
NIP. 19730330 200502 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmeet need</i>)	Persen	11,50
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Persen	58,00
3	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total	Angka	2,41

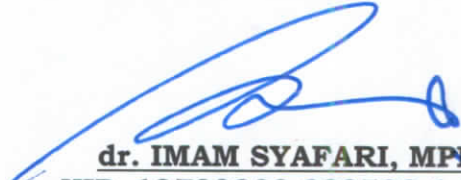
Jumlah Anggaran :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp.	3.323.788.440
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Rp.	329.071.032
3. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	30.094.000
	Rp.	3.682.953.472

Pihak Kedua,
**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**


SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana**


dr. IMAM SYAFARI, MPH
NIP. 19730330 200502 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULI RAMADHANITA, SIP**
Jabatan : **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SRI RIAWATI, S.P., M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

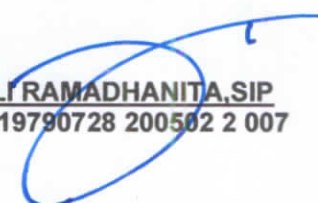
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas PP,PA,PP dan KB
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Ranai, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kabid.PPPA
Dinas PP,PA,PP, dan KB
Kabupaten Natuna



YULI RAMADHANITA, SIP
NIP. 19790728 200502 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di bidang Politik dan Ekonomi	Jumlah organisasi perempuan yang melakukan kegiatan bidang politik dan ekonomi	Jumlah	20
2.	Meningkatkan Anggaran Responsif Gender	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	70
3.	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan Komprehensif	Persen	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 562.661.700
- Program Perlindungan Perempuan	Rp. 574.770.000
- Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 308.637.000
- Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 214.348.900
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 224.197.000
JUMLAH	Rp. 1.884.614.000



Pihak Kedua,
Kepala Dinas PP, PA, PP dan KB
Kabupaten Natuna

SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

Ranai, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kabid.PPPA
Dinas PP, PA, PP, dan KB
Kabupaten Natuna

YULI RAMADHANITA, SIP
NIP. 19790728 200502 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NELLY AGUSFINA, S.A.P**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERRY GAPINA, ST**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas

Pihak Pertama,
Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan


ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007


NELLY AGUSFINA, S.A.P
NIP. 19810831 200902 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	40

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas,

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan


ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007


NELLY AGUSFINA, S.A.P
NIP. 19810831 200902 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESSY RATNASARI, S.STP**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ERRY GAPINA, ST**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

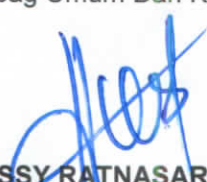
Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas

Pihak Pertama,
Kasubbag Umum Dan Kepegawaian


ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007


DESSY RATNASARI, S.STP
NIP. 19921216 2001507 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Orang	41
		Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	41
2.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen Pelayanan	Pelayanan	13
3.	Terlaksananya pelayanan administrasi sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah dokumen sarana dan prasarana	Dokumen	2
4.	Terlaksananya pelayanan umum perkantoran	Jumlah laporan kegiatan pelayanan	Laporan	13

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

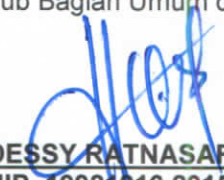
7. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	40.395.600
8. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Rp.	3.346.668.041
9. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	58.527.570
10. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Rp.	369.318.360
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	389.660.428
12. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	191.640.000
JUMLAH	Rp.	4.396.209.999

Ranai, 12 Januari 2024

Sekretaris Dinas,

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


ERRY GAPINA, ST
NIP. 19760824 200212 1 007


DESSY RATNASARI, S.STP
NIP. 19921216 201507 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MELDA IRAWATI, SE
Jabatan : KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI RIAWATI, S.P., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA UPTD-PPA

MELDA IRAWATI, SE

NIP.19841023 201403 2 001

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KB



SRI RIAWATI, S.P., M.Si

NIP.19710604 200212 2 002



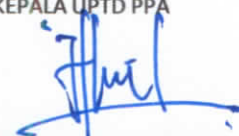
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terselenggaranya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Jumlah laporan	Laporan	12
2	Terselenggaranya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Jumlah laporan	Laporan	12
3	Terselenggaranya layanan administrasi di lingkup UPTD PPA sesuai peraturan pengadministrasian	Jumlah laporan	Laporan	12

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

SRI IRIAWATI, S.P., M.Si
NIP.19710604 200212 2 002

Pihak Pertama
KEPALA UPTD PPA

MELDA IRIAWATI, SE
NIP. 19841023 201403 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ANA KURNIAH, M.Si

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MELDA IRAWATI, SE

Jabatan : KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA UPTD

MELDA IRAWATI, SE
NIP. 19841023 201403 2 001

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA

ANA KURNIAH, M.Si
NIP. 19830610 200903 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

No.	SASARAN	Indikator	Satuan	Target
1	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen	Dokumen	12
2	Terlaksananya administrasi perlindungan perempuan dan anak	Jumlah dokumen	Dokumen	12

Ranai, 12 Januari 2024

Pihak Kedua
KEPALA UPTD

MELDA IRAWATI, SE
NIP. 19841023 201403 2 001

Pihak Pertama
KASUBBAG TATA USAHA

ANA KURNIAH, M.Si
NIP. 19830610 200903 2 005

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<i>Menurunnya Angka Kelahiran Total</i>	<i>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun</i>	2,58	2,43	94,18%
<i>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan</i>	24,52%	24,40 %	99,51%
<i>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100%	100%	100%
<i>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional</i>	46,45%	46,56%	100,2%
<i>Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif</i>	0%	5%	0%
<i>Tercapainya Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait</i>	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Tahun 2023	:	Rp	10,847,603,091,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2023	:	Rp	10,012,641,593,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2023	:	Rp	92,30%
Keterangan :			
Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023	:	Rp	5,117,050,006,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023	:	Rp	4.778,993,281,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2023	:	Rp	93,39 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2023	:	Rp	5,650,553,085,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2023	:	Rp	5,057,088,402
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2023	:	Rp	89,49%

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P., M.Si

NIP.19710604 200212 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN : 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.49
1.2.3.1.1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Persen	0,5
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	46.50
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persen	24.53
2.1.	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100
6.1.1.1.1.	Meningkatnya kinerja Pemerintah daerah	Nilai LAKIP	Nilai	80.00
6.1.1.2.1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.48

Ranai, 9 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



SRI RIAWATI, SP. . M. Si
NIP. 19710604 200212 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN : 2024

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	74.256.360
		Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6
		Outcome	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	77,64
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.532.630.000
		Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	51.000.000
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	14.000.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12.000.000
		Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	5.000.000
		Output	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40.000
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	37
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	9.000.000
		Output	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	238.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	148.000.000
		Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	113.500.000
		Output	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	13.000.000
		Output	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	148.000.000
		Output	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	3.000.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	284.500.000
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	12.000.000
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15.000.000
		Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4
		Outcome	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85,00
02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	83.726.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	25,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
02.2.01.03.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	20
		Outcome	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persen	25,00
02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	25.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3
		Outcome	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80,00
02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1
		Outcome	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80,00
02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				
02.2.02.02.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.696.908

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Output	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	18
		Outcome	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	Persen	0,00
02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
02.2.01.07.	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	2
		Outcome	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2,49
02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
02.2.01.02.	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2,49
02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				
02.2.01.05.	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	15.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	2
		Outcome	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2,49

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
02.2.02.08.	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	Unit	3
		Outcome	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2,49
02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
02.2.02.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	2
		Outcome	Total Fertility Rate	Nilai/Skor	2,49
03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	163.000.000
		Output	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang	Orang	14

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
			Mendapatkan Layanan Pengaduan		
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	12
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.03.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	40.000.000
		Output	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
03.2.03.04.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan	Persen	100,00

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
			Layanan Komprehensif		
03.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	4
		Outcome	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	79
		Outcome	Persentase m CPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77,78
03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
03.2.02.03.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	45.000.000
		Output	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P	Laporan	17

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
		Outcome	Persentase m CPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77,78
03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
03.2.04.01.	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	90.000.000
		Output	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	3
		Outcome	Persentase m CPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	Persen	77,78
03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
03.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	17
		Outcome	UnMeet need	Persen	11,85
03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13
		Outcome	UnMeet need	Persen	11,85

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	10.000.000
		Output	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	14
		Outcome	UnMeet need	Persen	11,85
03.2.03.09.	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	60
		Outcome	UnMeet need	Persen	11,85
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000
		Output	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	2
		Outcome	UnMeet need	Persen	11,85
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
04.2.01.05.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	666
		Outcome	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57,80
04.2.01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	30.000.000

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				
		Output	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15
		Outcome	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57,80
04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
04.2.01.12.	Sosialisasi IPK	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	0
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBanga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	150
		Outcome	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57,80
04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	100.000.000
		Output	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	7
		Outcome	Indek Pembangunan Keluarga	Persen	57,80
04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	68.000.000
		Output	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas	Laporan	12

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
		Outcome	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100,00
04.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
04.2.02.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1
		Outcome	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100,00
05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
05.2.01.01.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	20.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1
		Outcome	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	10,87
05.2.01.02.	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	Persen	10,87
06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
06.2.01.01.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	50.000.000
		Output	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1
		Outcome	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70,00
06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	80.000.000
		Output	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72
		Outcome	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70,00
07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	70.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100,00
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TOLAK UKUR KINERJA			
		INDIKATOR		SATUAN	TARGET
07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10
		Outcome	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100,00
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	120.000.000
		Output	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	12
		Outcome	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100,00
07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana yang tersedia	Rupiah	60.000.000
		Output	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
		Outcome	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100,00

Ranai, 9 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana



SRI RIAWATI, SP. , M. Si
NIP 19710604 200212 2 002

RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

NO	SASARAN KINERJA UTAM	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN				TOTAL ANGGARAN
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) PerWUS 15-49 Tahun	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Laporan	2	2	2	2	30.094.000
2.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) PerWUS 15-49 Tahun	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Menurunnya Angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Angka				25 Angka	38.928.440
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP oleh PKB/PLKB di Desa / Kelurahan	Angka				25 Angka	18.000.000
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya Jumlah KB MKJB	Orang				8.000	3.083.860.000
3.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) PerWUS 15-49 Tahun	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kepersetiaan Anggota Kelompok (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R dan PPKS	Persen				83%	213.941.300
4.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) PerWUS 15-49 Tahun		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPPKS) Aktif	Kelompok	25	25	25	25	115.129.732
5.	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Lembaga		1	1	1	100.215.500
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	Dokumen	1	1	1	1	287.961.500
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Organisasi	2	2	2	2	2	174.484.700
6.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Persen	100	100	100	100	365.640.000
				Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	6	6	6	6	144.500.000
7.	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	Keluarga	300	300	300	600	224.197.000

8.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait Kabupaten	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	Persen	100	100	100	100	214.348.900
9.	Mewujudkan Natuna sebagai Kabupaten Layak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	Kegiatan	2	3	3	2	83.370.000
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan	Anak	3	3	3	16	200.900.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan dan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100	100	100	100	99.400.000



Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna

SRI RIAWATI, S. P., M. Si
Pembina / IV.b
NIP. 19710604 200212 2 002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SRI RIAWATI, SP.M.Si	1	NAMA	BOY WLJANARKO VARIANTO, SE
2	NIP	197106042002122002	2	NIP	197708092002121005
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c
4	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	SEKRETARIS DAERAH
5	UNIT KERJA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT DAERAH

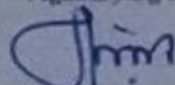
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

UTAMA				
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (Penugasan dari Pimpinan)	Total Fertility Rate (TFR)	2.49	Penerima Layanan
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Penugasan dari Pimpinan)	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	0.5 %	Penerima Layanan
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	Penerima Layanan
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	46.50 %	Penerima Layanan
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24.53 %	Penerima Layanan
3	Tercapainya Perlindungan Anak (Penugasan dari Pimpinan)	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100 %	Penerima Layanan
4	Meningkatnya Kinerja Pemerintah (Penugasan dari Pimpinan)	Nilai Sakip	72.30	Penguatan Internal

TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi Pelayanan			

PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

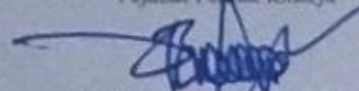
Pegawai yang Dinilai



SRI KLAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

Natuna, 2 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



BOY WILJANARNO, S.E
197708092002121005

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ERRY GAPINA, ST	1	NAMA	SRI RIAWATI, SP M Si
2	NIP	197608242002121007	2	NIP	197106042002122002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	SEKRETARIS	4	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT	5	UNIT KERJA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Indikator : Nilai Sakip	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	Kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja daerah	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Daerah	100 %
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	12 Bulan
2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Indikator : Nilai Sakip	Terselenggaraannya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Waktu	Waktu Terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Indikator : Nilai Sakip	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %
			Waktu	Waktu terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				
3	Kompeten			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				
4	Harmonis			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan Mampu bekerjasama dalam tim

Pegawai yang Dinilai

ERRY GAPINA, ST
197608242002121007

Ranai, 8 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja

SRI RIAWATI, SP.M Si
197106042002122002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO			NO	
1	NAMA	dr. IMAM SYAFARI, MPH	1	NAMA
2	NIP	197303302005021006	2	NIP
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG
4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

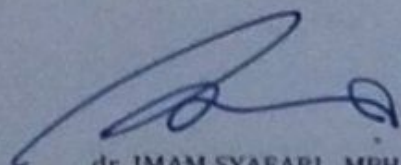
UTAMA

1	Menurunnya Angka Kelahiran Total Indikator : Total Fertility Rate (TFR)	Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Penduduk	Kuantitas	Jumlah dokumen laporan kegiatan pengendalian penduduk yang terlaksana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase kegiatan pengendalian penduduk yang terlaksana	100 %
			Waktu	waktu pelaksanaan	12 Bulan
2	Menurunnya Angka Kelahiran Total Indikator : Total Fertility Rate (TFR)	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Kuantitas	Jumlah dokumen laporan pembinaan keluarga berencana yang terlaksana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase kegiatan pembinaan yang terlaksana	100 %
			Waktu	waktu pelaksanaan	12 Bulan
3	Menurunnya Angka Kelahiran Total Indikator : Total Fertility Rate (TFR)	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Kuantitas	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera terlaksana	12 Dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kualitas	Persentase terlaksananya pembinaan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan ramah, cepat dan tepat		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan kerja		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal		
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif		

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dalam tim

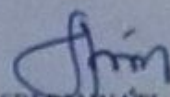
Pegawai yang Dinilai



dr. IMAM SYAFARI, MPH
197303302005021006

Ranai, 8 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



SRI KAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

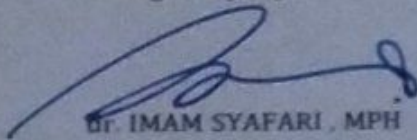
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | Penambahan Pegawai |
| 2. | Sarana dan prasarana dilengkapi |

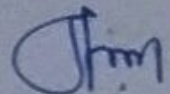
Pegawai yang Dinilai



Dr. IMAM SYAFARI, MPH
197303302005021006

Ranai, 8 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



SRI RIAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PERIODE PENILAIAN 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN 2 JANUARI SD 31 DESEMBER

PEMERINTAH KAB. NATUNA			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	
1	NAMA	YULI RAMADHANITA, S.IP	1	NAMA
2	NIP	197907282005022007	2	NIP
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG
4	JABATAN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	JABATAN
5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	UNIT KERJA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Tercapainya Perlindungan Anak Indikator : Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus	Kuantitas	Jumlah Dokumen pemenuhan hak anak dan pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Anak	12 laporan
			Kualitas	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan	12 bulan
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indikator : Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Bidang Politik dan Anggaran Responsif Gender bidang Politik	Kuantitas	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik	12 laporan
			Kualitas	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik	12 bulan

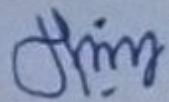
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indikator : Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Meningkatkan Peran Serta Perempuan di bidang ekonomi dan Anggaran Responsif Gender Bidang Ekonomi	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pemenuhan Hak Perempuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Ekonomi	12 laporan
			Kualitas	Persentase Peningkatan perempuan di Bidang Ekonomi	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	12 bulan
4	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indikator : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komphrensif	Meningkatkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pemenuhan Hak Perempuan dan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	12 laporan
			Kualitas	Persentase Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	12 bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan		

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan kantor
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dalam tim

Pegawai yang Dinilai

YULI RAMADHANITA, S.IP
197907282005022007

Ranai, 8 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja


SRI RIAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

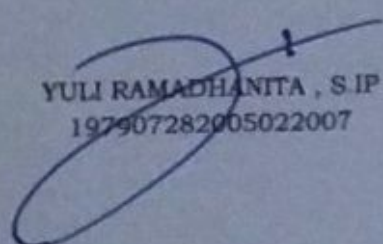
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA

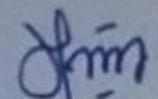
DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Sumber Daya Manusia Yang Terlatih
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	1. Konsultasi dan Koordinasi
2.	2. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Rencana
3.	3. Laporan Kegiatan
KONSEKUENSI	
1.	Jika Tidak Memenuhi Ekspektasi Maka Kinerja Akan dievaluasi

Pegawai yang Dinilai



YULI RAMADHANITA, S.IP
197907282005022007

Ranai, 8 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



SRI RIAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

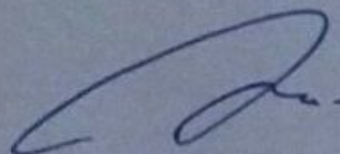
PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SRI JUANA, SKM, M.P.H	1	NAMA	dr IMAM SYAFARI, MPH
2	NIP	198007172006042019	2	NIP	197303302005021006
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Pembinaan Lini Lapangan (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD, TPK) terselenggara sesuai jadwal	Kuantitas	Juamiah Dokumen Terlaksananya Pembinaan Lini Lapangan (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD, TPK) terselenggara sesuai jadwal	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase terlaksananya pembinaan Lini Lapangan	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
2	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya pembinaan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R) di Kecamatan	Kuantitas	Jumlah Pembinaan Kelompok Kegiatan	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Pembinaan Kelompok Kegiatan	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
3	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya kegiatan penanggulangan stunting, perencanaan berkeuarga bagi remaja dan lansia tangguh	Kuantitas	Jumlah Dokumen Kegiatan Yang Terlaksana	12 Dokumen

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Kegiatan Stunting, Perencanaan Berkeluarga Bagi Remaja dan Lansia Tangguh	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
4	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksanannya Advokasi Program Bangga Kencana	Kuantitas	Jumlah advokasi Program Bangga Kencana	4 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Advokasi Program Bangga Kencana Sesuai Jadwal	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1 Berorientasi Pelayanan					
		- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu melaksanakan pelayanan dengan ramah, cekatan, memahami pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selalu melakukan perbaikan tiada henti dalam memberikan pelayanan		
2 Akuntabel					
		- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kekayaan dan kewenangan jabatan		
3 Kompeten					
		- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan baik		
4 Harmonis					
		- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai orang lain, suka membangun lingkungan kerja yang kondusif		

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang -Undang Dasar 1945, menjaga nama baik ASN dan rahasia jabatan dan negara
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu menyesuaikan diri, berinovasi dan bertindak proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama kepada berbagai pihak untuk menggerakkan pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan yang sama

Pegawai yang Dinilai

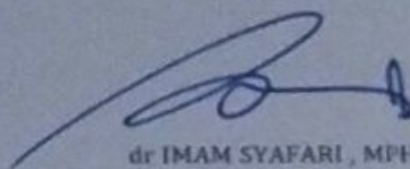


SRI JUANA, SKM, M.P.H

198007172006042019

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



dr IMAM SYAFARI, MPH

197303302005021006

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	TRI CAHYANI WIDI HASTUTI, SKM	1	NAMA	YULI RAMADHANITA, S.IP
2	NIP	198412262010012023	2	NIP	197907282005022007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA					
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat	Kuantitas	Jumlah dokumen kegiatan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat	12 laporan
			Kualitas	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga di masyarakat	12 bulan
2	Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Bidang Politik dan Anggaran Responsif Gender bidang Politik	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kuantitas	Jumlah dokumen koordinasi, fasilitasi dan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12 dokumen
			Kualitas	Persentase terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	12 bulan

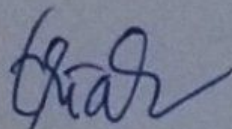
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan kantor	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal	
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif	
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Mampu bekerjasama dalam tim

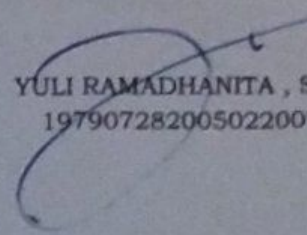
Pegawai yang Dinilai



TRI CAHYANI WIDI HASTUTI, SKM
198412262010012023

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



YULI RAMADHANITA, S.IP
197907282005022007

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI S.D. 31 DESEMBER TAHUN 2021

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	APRI SUZANA, SKM	1	NAMA	DESSY RATNASARI, S.STP
2	NIP	198204242008032002	2	NIP	199212162015072002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terlaksananya pencatatan kebutuhan sarana dan prasarana	Kuantitas	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana yang tercatat	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pencatatan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan Pencatatan Kebutuhan Sarana dan Prasarana	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

AFRI SUZANA, SKM
198204242008032002

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja

DESSY RATNASARI, S.STP
199212162015072002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	KUWATI, S.IP	1	NAMA	YULI RAMADHANITA, S.IP
2	NIP	198004122000122001	2	NIP	197907282005022007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Perempuan dan Keluarga	Kuantitas	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak	12 dokumen
2	Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Bidang Politik dan Anggaran Responsif Gender bidang Politik	Terlaksananya Koordinasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Kuantitas	terlaksananya sistem PPRG	12 dokumen

TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

KUWATI, S.IP
198004122000122001

Ranai, 9 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

YULI RAMADHANITA, S.IP
197907282005022007

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. NATUNA

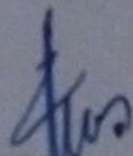
PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	SUCI HARNI, AMK.	1	NAMA	Dr IMAM SYAFARI, MPH
2	NIP	197908072006042029	2	NIP	197303302005021006
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya konsep perumusan kebijakan, pembinaan, kerjasama pendidikan, pengendalian dan perencanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.	Kuantitas	Jumlah Dokumen hasil perumusan kebijakan, kerjasama pendidikan, pengendalian dan perencanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase kegiatan yang terlaksana	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaannya	12 Bulan
2	Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya Pembinaan , pengumpulan, pengolahan , valuasi, penyajian data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sesuai perencanaan.	Kuantitas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan Informasi	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase kegiatan yang terlaksana	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaannya	12 Bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya fasilitasi, Advokasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kuantitas	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi, Advokasi, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan keluarga , kependudukan dan keluarga berencana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase kegiatan yang terlaksana	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaannya	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu melaksanakan Pelayanan dengan Ramah, Cekatan ,memahami pemenuhan kebutuhan masyarakat dan selalu melakukan perbaikan tiada henti dalam memberikan pelayanan		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan kekayaan dan kewenangan jabatan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan baik.		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai orang lain, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.		
5	Loyal				

PERILAKU KERJA	
- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjaga nama baik ASN dan rahasia jabatan dan negara
6 Adaptif	
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan diri, berinovasi dan bertindak proaktif
7 Kolaboratif	
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama kepada berbagai pihak untuk menggerakkan pemanfaatan sumberdaya untuk tujuan sama.

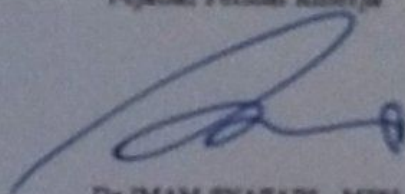
Pegawai yang Dinilai



SUCI HARNI, AMK.
197908072006042029

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



Dr. IMAM SYAFARI, MPH
197303302005021006

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	DESSY RATNASARI, S.STP	1	NAMA	ERRY GAPINA, ST
2	NIP	199212162015072002	2	NIP	197608242002121007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	4	JABATAN	SEKRETARIS
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terlaksana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
			Waktu	Waktu Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan
2	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %
			Waktu	Waktu Terlaksananya Pelayanan Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan
3	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Umum Perkantoran	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran	100 %
			Waktu	Waktu Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran	12 Bulan
4	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen

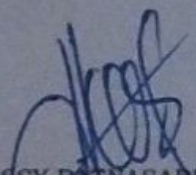
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

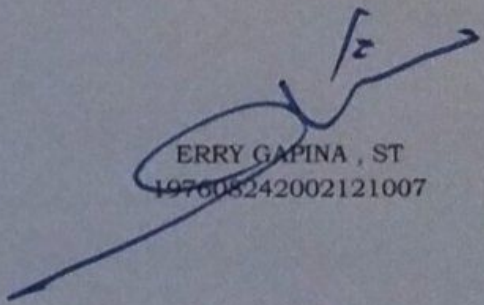
Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai


DESSY RATNASARI, S.STP
199212162015072002

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja


ERRY GAPINA, ST
197608242002121007

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MELDA IRAWATI, S.E	1	NAMA	SRI RIAWATI, SP.M.Si
2	NIP	198410232014032001	2	NIP	197106042002122002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA UPT DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	UPT DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Indikator : Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komphrensif	Terselenggaranya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Kuantitas	Jumlah laporan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 laporan
			Kualitas	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tercapainya Perlindungan Anak Indikator : Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Terselenggaranya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Kuantitas	Jumlah laporan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 laporan
			Kualitas	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	12 bulan
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Indikator : Nilai Sakip	Terselenggaranya layanan administrasi di lingkup UPTD PPA sesuai peraturan pengadministrasian	Kuantitas	Jumlah laporan layanan administrasi dilingkup UPTD PPA	12 laporan
			Kualitas	Persentase layanan administrasi dilingkup UPTD PPA	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan kegiatan layanan administrasi dilingkup UPTD PPA	12 bulan

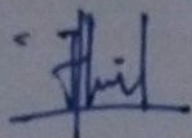
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target
4	Harmonis	

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai di lingkungan serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bertindak proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dalam tim

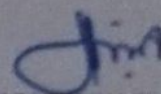
Pegawai yang Dinilai



MELDA IRAWATI, S.E
198410232014032001

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



SRI IRAWATI, SP.M.Si
197106042002122002

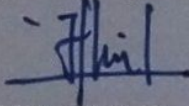
LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	Penambahan SDM yang handal dibidangnya untuk adminsitrasi kantor, penjangkauan dan pendampingan kasus perempuan dan anak
2.	Penambahan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung kantor sendiri, rumah aman dan perlengkapan kantor lainnya
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN	
1.	Melakukan rapat koordinasi rutin dengan para tenaga pendamping kasus perempuan dan anak
2.	Selalu melaporkan kegiatan dan penanganan kasus ke atasan
3.	Melakukan evaluasi kinerja bawahan
KONSEKUENSI	
1.	Apabila berprestasi akan diberikan penghargaan
2.	Apabila melanggar akan diberikan sanksi

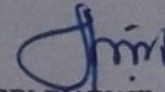
Pegawai yang Dinilai



MELDA IRAWATI , S.E
198410232014032001

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



SRI IRAWATI , SP.M.Si
197106042002122002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

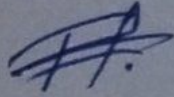
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	NELLY AGUSFINA, S.A.P.	1	NAMA	ERRY GAPINA, ST
2	NIP	198108312009022003	2	NIP	197608242002121007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	4	JABATAN	SEKRETARIS
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA	SEKRETARIAT
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kuantitas	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan
2	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kuantitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan
TAMBAHAN					

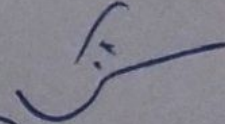
PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi Pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	
2	Akuntabel	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	
3	Kompeten	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	
4	Harmonis	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	
5	Loyal	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	
7	Kolaboratif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	

Pegawai yang Dinilai



NELLY AGUSFINA , S.A.P.
198108312009022003

Ranai, 9 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



ERRY GAPINA , ST
197608242002121007

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MERRY ROBIYANTI, SE	1	NAMA	dr. IMAM SYAFARI, MPH
2	NIP	197405232008012008	2	NIP	197303302005021006
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENYUSUN PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Penduduk	Terlaksananya penyusunan pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana	Kuantitas	Terlaksananya Jumlah Dokumen penyusunan pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase penyusunan pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana	100 %
			Waktu	Waktu pelaksanaan penyusunan pencatatan dan pelaporan data kependudukan dan keluarga berencana	12 bulan

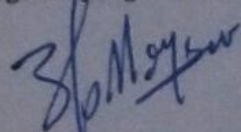
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku
2	Akuntabel		

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dalam tim

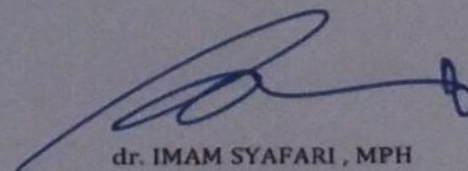
Pegawai yang Dinilai



MERRY ROBIYANTI, SE
197405232008012008

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



dr. IMAM SYAFARI, MPH
197303302005021006

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

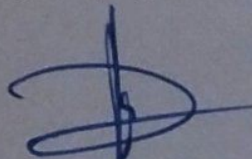
PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	ANIK KUSRINI, SST	1	NAMA	dr. IMAM SYAFARI, MPH
2	NIP	198311122008032004	2	NIP	197303302005021006
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya, Penyusunan, Pengendalian Pendistribusian Alkon dan sasaran penunjang Pelayanan KB ke Faskes.	Kuantitas	Jumlah Dokumen Penyusunan Pengendalian Pendistribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes.	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Penyusunan Pengendalian Pendistribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes.	100%
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Penyusunan Pengendalian Pendistribusian Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes.	12 Bulan
2	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	Kuantitas	Jumlah Dokumen Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya operasional dan sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	100%

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Waktu	Waktu Terlaksananya operasional dan sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	12 Bulan
3	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana	Terlaksannya Pembinaan, Penyuluhan, konseling Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi	Kuantitas	Jumlah Dokumen terlaksananya pembinaan, penyuluhan dan konseling pelayanan keluarga berencana	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase terlaksannya pembinaan, penyuluhan dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	100%
			Waktu	Waktu Terlaksannya pembinaan penyuluhan dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan sesuai peraturan yang berlaku		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggungjawab		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif		

PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu bekerjasama dalam tim

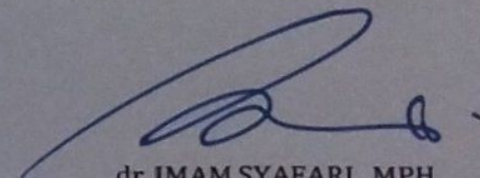
Pegawai yang Dinilai



ANIK KUSRINI, SST
198311122008032004

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



dr. IMAM SYAFARI, MPH
197303302005021006

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ANA KURNIAH, M.Si	1	NAMA	MELDA IRAWATI, S.E
2	NIP	198306102009032005	2	NIP	198410232014032001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UPT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	JABATAN	KEPALA UPT DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN TATA USAHA UPT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5	UNIT KERJA	UPT DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terselenggaranya layanan administrasi di lingkup UPTD PPA sesuai peraturan pengadministrasian	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian di lingkup UPTD PPA sesuai peraturan pengadministrasian	Kuantitas	Jumlah dokumen administrasi umum dan kepegawaian yang tersedia	12 dokumen
			Kualitas	Presentase dokumen yang dihasilkan	100%
			Waktu	Waktu pelaksanaan	12 bulan
2	Terselenggaranya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Terselenggaranya administrasi pelayanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kuantitas	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perlindungan perempuan yang tersedia	12 dokumen
			Kualitas	Persentase dokumen yang dihasilkan	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 bulan

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Terselenggaranya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	Terselenggaranya administrasi pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kuantitas	Jumlah dokumen pelayanan administrasi perlindungan anak yang tersedia	12 dokumen
			Kualitas	Persentase dokumen yang dihasilkan	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pelayanan dengan cepat, ramah dan memahami kebutuhan masyarakat		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan tugas dengan jujur disiplin dan berintegritas tinggi		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik sesuai target		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu menghargai setiap pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu menjaga kode etik pelayanan, nama baik kantor baik internal maupun eksternal		
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bertindak proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: mampu bekerja sama dalam tim

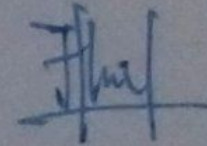
Pegawai yang Dinilai



ANA KURNIAH, M.Si
198306102009032005

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



MELDA IRAWATI, S.E
198410232014032001

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

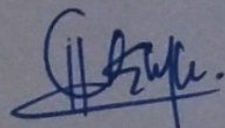
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA				
NO			NO				
1	NAMA	MEGA PRIMASARY SABLI, S.Sos	1	NAMA	YULI RAMADHANITA, S.IP		
2	NIP	198310072014032001	2	NIP	197907282005022007		
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a		
4	JABATAN	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		RENCANA HASIL KERJA		ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
UTAMA							
1	Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Bidang Politik dan Anggaran Responsif Gender bidang Politik		Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi partisipasi perempuan bidang politik dan ekonomi		Kuantitas	Jumlah Laporan	12 Dokumen
					Kualitas	Persentase	100 %
					Waktu	Bulan	12 Bulan
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan		Terlaksananya pelayanan dan pendampingan perlindungan dari tindak kekerasan serta pemenuhan hak bagi perempuan dan anak		Kuantitas	Jumlah Laporan	12 Dokumen
					Kualitas	Persentase	100 %
					Waktu	Bulan	12 Bulan
TAMBAHAN							
PERILAKU KERJA							
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan Pelayanan Dengan Cepat, Ramah dan Sesuai Aturan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti						

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melaksanakan pekerjaan dengan jujur dan bertanggung jawab
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu Menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu Menghargai setiap Pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dilingkungan kantor
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu Menjaga nama baik kantor baik internal maupun eksternal
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu Menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan bersikap proaktif
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Mampu Bekerja sama dengan Tim

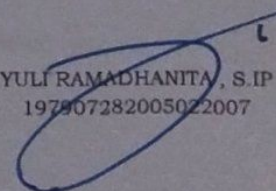
Pegawai yang Dinilai



MEGA PRIMASARY SABL, S.Sos
198310072014032001

Ranai, 9 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

YULI RAMADHANITA, S.IP
197907282005022007



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

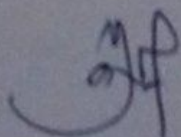
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA					
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	LINA AGUSTINA, S.Sos	1	NAMA	YULI RAMADHANITA, S.IP
2	NIP	198501052014032002	2	NIP	197907282005022007
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	4	JABATAN	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	UNIT KERJA	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan khusus	Tersedianya perlindungan khusus anak dan pemenuhan Hak anak	Kuantitas	Jumlah Laporan Kegiatan perlindungan khusus anak dan pemenuhan Hak anak	12 Dokumen
			Kualitas	Presentase perlindungan khusus anak dan pemenuhan Hak anak	100%
			Waktu	Waktu Pelaksanannya	12 Bulan
2	Meningkatkan Pemenuhan Hak Perempuan dan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan	Terlaksananya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Kuantitas	Jumlah Laporan Kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	100%
			Waktu	Waktu pelaksanaannya	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				

PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

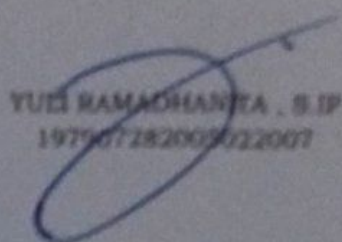
Pegawai yang Dinilai



LINA AGUSTINA, S.Sos
198501052014032002

Ramal, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



YULI RAMADHANTA, S.IP
197907282003022007

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DESSY AFRIANTY, S.I.P.	1	NAMA	NELLY AGUSFINA, S.A.P.
2	NIP	197904152002122012	2	NIP	198108312009022003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENATA KEUANGAN	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melakukan Kegiatan Pencatatan Penerimaan dan pengeluaran, Pemeriksaan, serta Penataan di Bidang Dokumen Keuangan	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, Pemeriksaan, serta Penataan di bidang dokumen keuangan	12 dokumen
			Kualitas	Persentase terselenggaranya kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan, serta penataan di bidang dokumen keuangan	100 %
			Waktu	Waktu terselenggaranya kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, pemeriksaan, serta penataan di bidang dokumen keuangan	12 bulan

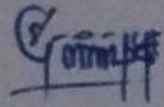
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1 Berorientasi Pelayanan

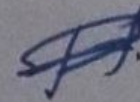
PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai



DESSY AFRIANTY , S.I.P.
197904152002122012

Ranai, 9 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



NELLY AGUSFINA , S.A.P.
198108312009022003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 9 JANUARI SD 31 JANUARI TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DANY WARDANA, S.IP	1	NAMA	NELLY AGUSFINA, S.A.P.
2	NIP	198409052009011004	2	NIP	198108312009022003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kuantitas	Jumlah Bahan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	90 Persen
			Waktu	Ketepatan Waktu Penyiapan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan

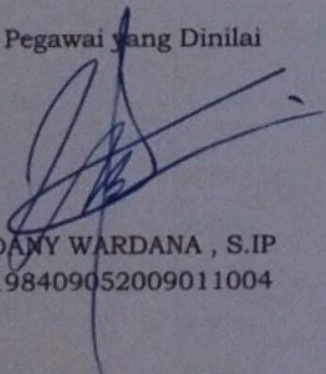
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi Pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	

PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai


 DANY WARDANA, S.IP
 198409052009011004

Ranai, 9 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja


 NELLY AGUSFINA, S.A.P.
 198108312009022003

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ERNAWATI	1	NAMA	NELLY AGUSFINA, S.A.P.
2	NIP	198005052006042050	2	NIP	198108312009022003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	BENDAHARA	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

UTAMA

1	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan di Perangkat Daerah	Kuantitas	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Tersedia Lengkap	12 dokumen
			Kualitas	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Terselesaikan	100 %
			Waktu	Waktu Pelaksanaan	12 bulan

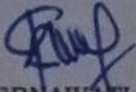
TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

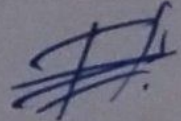
1	Berorientasi Pelayanan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	
2	Akuntabel	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	
3	Kompeten	

PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai


 ERNAWATI
 198005052006042050

Ranai, 9 Januari 2024
 Pejabat Penilai Kinerja


 NELLY AGUSFINA, S.A.P.
 198108312009022003

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

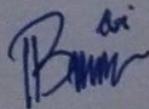
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
1	NAMA	IBNA RETI	1	NAMA	NELLY AGUSFINA, S.A.P.
2	NIP	198010182007012013	2	NIP	198108312009022003
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pengadministrasi Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Kuantitas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Keuangan	100%
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Dokumen Perencanaan dan Keuangan	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				

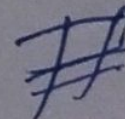
PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai



IBNA RETI
198010182007012013

Ranai, 9 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



NELLY AGUSFINA, S.A.P.
198108312009022003

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NO			NO		
1	NAMA	MEMIATI, A.Ma	1	NAMA	DESSY RATNASARI, S.STP
2	NIP	198307252010012016	2	NIP	199212162015072002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Mengadmnistrasikan Dokumen Pelayanan Kepegawaian	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Kepegawaian	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian	100 %
			Waktu	Waktu Terlaksananya Pengadministrasian Kepegawaian	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				Ekspektasi Khusus Pimpinan:
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				
3	Kompeten				

PERILAKU KERJA		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

MEMIATI, A.Ma
198307252010012016

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja

DESSY RATNASARI, S.STP
199212162015072002

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL**

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

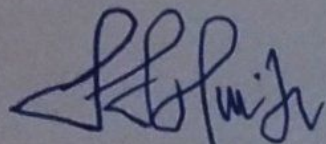
PEMERINTAH KAB. NATUNA

PEMERINTAH KAB. NATUNA

PEGAWAI YANG DINILAI			NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
NO					
1	NAMA	AMINAH HT	1	NAMA	DESSY RATNASARI, S.STP
2	NIP	197708102000122003	2	NIP	199212162015072002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM	4	JABATAN	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	5	UNIT KERJA	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengadministrasikan Pelayanan Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Pelayanan Perkantoran	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Pelayanan Perkantoran	100 %
			Waktu	Waktu Terselenggarakannya Pengadministrasian Pelayanan Perkantoran	12 Bulan
2	Terlaksananya Pelayanan Umum Perkantoran	Mengadministrasikan Pelayanan Umum Perkantoran	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Pelayanan Umum Perkantoran	12 Dokumen
			Kualitas	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Pelayanan Umum Perkantoran	100 %
			Waktu	Waktu Terselenggaranya Pengadministrasian Pelayanan Umum Perkantoran	12 Bulan
TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				

PERILAKU KERJA		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai yang Dinilai

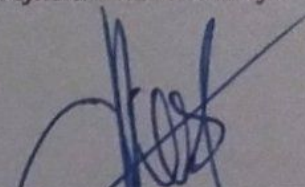


AMINAH HT

197708102000122003

Ranai, 9 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



DESSY RATNASARI, S.STP

199212162015072002